



**Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukabumi**



**EVALUASI HASIL RKP
KABUPATEN SUKABUMI
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 ini bertujuan untuk menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan selanjutnya.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Hasil ini disusun berdasarkan evaluasi atas pencapaian delapan belas (18) sasaran strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah, capaian indikator program, termasuk pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Sukabumi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran dalam RKPD pada Triwulan IV Tahun 2024 termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan RKPD Triwulan IV Tahun 2024. Laporan juga diharapkan dapat memberikan pelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan RKPD.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih.

Palabuhanratu, Januari 2025

Bupati,

t.t.d.

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan perencanaan daerah selama ini tidak terlepas dari tatanan perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan perencanaan daerah di Kabupaten Sukabumi sudah mengacu kepada peraturan di atas, khususnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang mengatur secara detail tentang perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Kebijakan Perencanaan Daerah Kabupaten Sukabumi tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Sedangkan untuk RKPD tahun 2024 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi juga bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Kabupaten Sukabumi, dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bappelitbangda. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Bupati dalam mewujudkan:

- a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan di Kabupaten Sukabumi;
- b) Konsistensi antara RKPD Tahun 2024 dengan RPJMD 2021-2026; dan
- c) Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kabupaten Sukabumi dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan pusat, provinsi, dan kabupaten.

Evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari evaluasi hasil RPJMD Tahun 2021-2026, yang memiliki ruang lingkup untuk:

- a) memastikan kesesuaian program, indikator, target, dan pagu antara RKPD dan APBD; dan
- b) menilai capaian target kinerja RPJMD untuk memastikan bahwa target kinerja telah dicapai guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang tertuang di dalam RPJMD. Evaluasi hasil RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa RPJMD telah dijadikan sebagai dasar penyusunan RKPD dan APBD. Berdasarkan data dan informasi dari dokumen yang tersedia, dapat diuraikan perbandingan jumlah dan pagu program, serta jumlah kegiatan, konsistensi indikator dan target kegiatan, antara RKPD dan APBD Kabupaten Sukabumi menggunakan Penilaian Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran VI yang direvisi dengan Permendagri 86 Tahun 2017.

Berdasarkan data dan informasi dari dokumen yang tersedia, dapat diuraikan perbandingan jumlah dan pagu program, serta jumlah kegiatan, konsistensi indikator dan target kegiatan, antara RKPD dan APBD menggunakan Penilaian Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, seperti yang ditampilkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan laporan Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 TAHUN 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomuenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317.Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 118)
14. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 94)
15. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 21 tahun 2011 tentang Tahapan Dan Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan evaluasi RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 pada Triwulan IV adalah untuk menilai dan mengevaluasi :

1. Pencapaian target-target program kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2024, serta :
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dengan APBD Kabupaten Sukabumi.

Adapun tujuan Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 adalah untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2024 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan evaluasi pembangunan bidang disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukabumi. Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Kabupaten Sukabumi, prioritas pembangunan daerah tahun 2024, program dan kegiatan pembangunan tahun 2024;
- Bab III : Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024. Bab ini berisi tentang Capaian kinerja sasaran, Capaian kinerja tematik (a.l. stunting, kemiskinan, SPM, dst), Capaian kinerja program dan kegiatan (dilengkapi dengan tabel Evaluasi Hasil RKPD), serta dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan provinsi dan nasional;
- Bab IV : Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja. Bab ini berisi tentang faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta tindak lanjut bagi pelaksanaan triwulan/RKPD berikutnya
- Bab V : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil pelaksanaan RKPD dan rekomendasi perencanaan tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKABUMI

2.1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sukabumi

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi untuk perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”. Pernyataan visi tersebut memiliki dua elemen penting yaitu Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif; serta masyarakat sejahtera lahir batin.

Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif, merupakan perwujudan pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.

Masyarakat sejahtera lahir batin, merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Adapun misi sebagai berikut:

1. **Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing.**

Sejatinya, manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak seluruh komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu dilakukan perubahan menuju arah yang positif dengan membangun sumber daya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumber daya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.

Sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya pada bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah.

Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah akan dapat diakselerasi jika akses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang sangat beragam, menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik hardware (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll) maupun software (teknologi informasi dan komunikasi) akan membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dijangkau dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Selain itu, Kerjasama antar wilayah dapat lebih mudah, sehingga pemerataan pembangunana dapat ditingkatkan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi ditataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan good governance, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan clean government. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif, dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan

memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (e-government).

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Dalam jangka panjang sasaran pembangunan daerah keberhasilannya dilihat dari capaian indikator makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini.

Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dimana keberhasilan maupun kegagalan pencapaiannya ditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat sektoral, regional dan nasional, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu kerja sama vertikal pusat ke daerah, serta kerja sama horizontal yang melibatkan perangkat-perangkat daerah yang didukung dengan kerja sama antar para pemangku kepentingan. Indikator Makro Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Keterkaitan Target Indikator Makro Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Kab. Sukabumi 2024 *)	Kab. Sukabumi 2024 ****)	Jawa Barat 2024 **)	Nasional 2024 ***)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,60	67,64	68,39	67,99	73,56	73,99-74,02
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,21	1,69	1,17	-	-	-
3	Tingkat kemiskinan	Persen	6,91	7,34	6,60	6,92	7,68	6,5 – 7,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9 - 11	7,77	8,5 -10,5	7,60	8,01	5,0 – 5,7
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,30 – 3,30	5,12	4,75-5,42	5,00	5,67	5,3 – 5,7
6	Pendapatan Per Kapita	Rp (1000) /Kapita	27.548-27.797	27.165	28.187-28.386	-	-	-
7	Indeks Gini	Poin	0,358-0,338	0,309	0,332	0,303	0,408	0,374 – 0,374
8	PDRB Per Kapita ADHK	(Juta RP)	17.953	17.953	18.760	18.760	33,92	-

Sumber:*) RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026; **) RKPd Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; ***) Ranwal RKP 2024; ****)Target kesepakatan dengan Provinsi Jawa Barat

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan, serta tujuan dan sasaran Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi kinerja awal		Target 2024
			2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN					
Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing					
T1: Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	67,60	67,64	68,39
	SS1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	74,50	75,17	76,00
	SS2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (AHH) (Tahun)	71,26	71,54	71,63
		Angka kematian ibu (Per 100.000 KH)	84,00	77,09	82,00
		Angka kematian bayi (Per 1.000 KH)	4,25	3,45	4,15
SS3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	87,64	87,64	87,92	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi kinerja awal		Target 2024
			2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
	SS4. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7,32	7,11	7,55
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,38	12,25	12,47
	SS5. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (Persen)	6,91	7,34	6,60
	SS6. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase kemajuan kebudayaan (Persen)	20,48	22,11	22,61
	SS7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	9-11	9,51	8,5 - 10,5
Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan					
T2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan.		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)	2,30-3,30	5,12	4,75 – 5,42
	SS8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan (Persen)	2,33	5,4	3,13
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	85,10	85,80	86,10
	SS9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (Persen)	(-1)-0,5	10,1	1 - 2
	SS10. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata (Persen)	2,5	1242,9	3,5
	SS11. Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas (Persen)	2,50	2,50	2,5
	SS12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (Poin)	66,85	65,47	68,11
Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah					
T3: Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur		Indeks kepuasan layanan infrastruktur (Poin)	2,60	n/a	2,80

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi kinerja awal		Target 2024
			2022 (Target)	2022 (Realisasi)	
daerah yang berkualitas.	SS13. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah (Persen)	76,17	76,17	88,08
	SS14. Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kamantapan kondisi jalan Kabupaten (Persen)	63,53	74,23	71,53
		Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (Persen)	50,80	61,05	54,80
	SS15. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata (Persen)	17,49	19,48	26,17
	SS16. Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio konektivitas kabupaten (Persen)	43	43	60
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan akuntabel					
T4: Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani (T4)		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	63	63	65,00
	SS17. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) (Poin)	86,50	86,64	87,50
		Indeks profesionalisme ASN (Poin)	60,20	66,13	71,40
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Opini)	WTP	WTP	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja daerah (Poin)	68,00	65,95	72,00
SS18. Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah (Poin)	57,50	57,02	59,00	

2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis daerah, dan janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, serta penelaahan prioritas nasional, Provinsi Jawa Barat, dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan penting untuk menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi gambaran umum daerah, memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional.

Adapun isu strategis Kabupaten Sukabumi tahun 2024 mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat, permasalahan sosial, dan ketahanan bencana.
3. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan peningkatan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah.
4. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan lima isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, sebagaimana mengacu pada strategi dan arah kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan			
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN						
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.						
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang	SS1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	01.01	Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan	01.01.01	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan
					01.01.02	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan
					01.01.03	Meningkatkan kualitas pendidik keagamaan

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan			
religius			kualitas nilai-nilai keagamaan	01.01.04	Meningkatkan kualitas keimanan guru dan siswa	
	SS2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	02.01	Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat	02.01.01	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
					02.01.02	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
					02.01.03	Meningkatkan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit
					02.01.04	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera
					02.01.05	Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat menuju <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>
			02.02	Meningkatnya peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	02.02.01	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
					02.02.02	Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
					02.02.03	Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
					02.02.04	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
			02.03	Meningkatkan infrastruktur kesehatan	02.03.01	Meningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan
					02.03.02	Mengembangkan fasilitas kesehatan masyarakat terhadap akses keterjangkauan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit.
	SS3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	03.01	Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	03.01.01	Meningkatkan ketahanan keluarga serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan
	SS4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	04.01	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata	04.01.01	Meningkatkan pemerataan pengelolaan layanan pendidikan dan kualitas kurikulum
					04.01.02	Meningkatkan akreditasi kelembagaan pendidikan.

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
					04.01.03	Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan melalui peningkatan biaya operasional penyelenggaraan (BOP)
					04.01.04	Meningkatkan minat baca dan belajar tenaga pendidik dan masyarakat
	SS5	Menurunnya tingkat kemiskinan	05.01	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	05.01.01	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
					05.01.02	Meningkatkan pemerataan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
					05.01.03	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi Masyarakat Miskin
	SS6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	06.01	Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	06.01.01	Melestarikan dan mempromosikan objek pemajuan kebudayaan
					06.01.02	Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan
	SS7	Menurunnya tingkat pengangguran	07.01	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja	07.01.01	Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non-institusional
					07.01.02	Menjalin kerjasama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri
			07.02	Memperluas kesempatan kerja	07.02.01	Optimalisasi Silent Center dalam rangka peningkatan kesempatan kerja
					07.02.02	Memperluas Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Laki-Laki
					07.02.03	Meningkatkan Kesempatan Kerja pada Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata
					07.02.04	Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri
					07.02.05	Mengoptimalkan peranan stakeholder ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan						

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan.	SS8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	08.01	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan	08.01.01	Ektensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan		
					08.01.02	Mengembangkan kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis		
					08.01.03	Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis		
					08.01.04	Mencetak agripreneur milenial yang potensial		
					08.01.05	Optimalisasi peranan BUMD dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dan perikanan		
					08.01.06	Optimalisasi peran swasta dan masyarakat melalui kerjasama pengembangan sektor pertanian, dan perikanan		
					08.01.07	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sektor pertanian dan perikanan		
			08.02	Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian dan perikanan, yaitu mendorong kemudahan aksesibilitas pembiayaan/permodalan agribisnis bagi para pelaku usaha pertanian dan perikanan	08.02.01	Mengembangkan skema <i>closed loop</i> dalam peningkatan nilai tambah pertanian		
					08.02.02	Optimalisasi sektor swasta pada industri hilir komoditas pangan		
			08.03	Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	08.03.01	Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan		
					08.03.02	Mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu		
					08.03.03	Meningkatkan pengankaraman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan		
			SS9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	09.01	Membudayakan pelayanan wisata kelas dunia	09.01.01	Membangun budaya insan pariwisata berkelas dunia
							09.01.02	Mengkampanyekan nilai dan spirit kepariwisataan (Setiap kegiatan adalah event, setiap tempat adalah destinasi)

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan		
		09.02 Meningkatkan kualitas daya tarik dan promosi destinasi wisata unggulan	09.02.01 Meningkatkan Konsep 3A+2P wisata pada kawasan destinasi unggulan		
			09.02.02 Pengembangan produk wisata unggulan daerah (wisata alam, wisata budaya, wisata halal, wisata religi dan wisata investasi)		
			09.02.03 Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif daerah		
			09.02.04 Memaksimalkan peranan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan melalui zonasi untuk segmentasi		
			09.02.05 Mendorong Kelembagaan Badan Pengelola CPUGG untuk menjadi Badan Usaha independen yang kredibel dan profesional		
			09.02.06 Optimalisasi konsep <i>Community Based Tourism</i> dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis BUMDes		
	SS10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	10.01 Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang agribisnis dan pariwisata	10.01.01 Memetakan potensi investasi daerah khususnya di bidang agribisnis dan pariwisata	
				10.01.02 Meningkatkan promosi potensi investasi daerah berbasis digital	
				10.01.03 Mendorong sinergi antar sektor dan <i>stakeholder</i> dalam peningkatan investasi daerah	
				10.01.04 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kemudahan perizinan melalui penguatan implementasi OSS	
	SS11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	11.01 Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas produk pelaku usaha	11.01.01 Pemetaan Pelaku usaha berbasis skala usaha	
				11.01.02 Meningkatkan kualitas SDM berbasis skala usaha	
				11.01.03 Mendorong <i>branding</i> produk unggulan daerah	
			11.02	Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui pendataan pelaku usaha	11.02.01 Mendorong pertumbuhan sentra UMKM dan IKM
					11.02.02 Optimalisasi peranan kelembagaan koperasi dan BUMD dalam pengembangan usaha
					11.02.03 Mendorong pendirian BPR Syariah dalam mendukung peningkatan akses keuangan
					11.02.04 Memperluas akses pasar di dalam dan luar negeri

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
	SS12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12.01	Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup	12.01.01	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan
					12.01.02	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis rumah tangga (jakstrada)
					12.01.03	Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan daerah
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah						
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	SS13	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	13.01	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian	13.01.01	Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE
			13.02	Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika	13.02.01	Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
					13.02.02	Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang
	13.03	Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung perluasan cakupan area	13.03.01	Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyediaan layanan jaringan publik		
	SS14	Meningkatnya kualitas infrastruktur	14.01	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	14.01.01	Meningkatkan kemandirian jalan dan jembatan kabupaten sesuai target waktu penyelesaian
					14.01.02	Meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
			14.02	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	14.02.01	Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi kabupaten
	SS15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	15.01	Meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan dasar	15.01.01	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana air minum
					15.01.02	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana sanitasi (persampahan, air limbah domestik, drainase permukiman)
15.02			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan	15.02.01	Membangun rumah layak huni untuk masyarakat terdampak bencana dan relokasi akibat pembangunan	
				15.02.02	Mengembangkan kawasan permukiman yang tanggap bencana	

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
			15.03	Meningkatkan ketersediaan RTH/Ruang Publik di kawasan perkotaan	15.03.01	Meningkatkan kualitas PSU permukiman
			15.03.02	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RTH/Ruang Publik		
			15.04	Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)	15.04.01	Meningkatkan kualitas pengelolaan P4T dan percepatan fasilitasi pelayanan bidang pertanahan
	SS16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	16.01	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan transportasi	16.01.01	Meningkatkan Kualitas SDM perhubungan melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
					16.02.01	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi berkeselamatan yang menghubungkan wilayah strategis tingkat kabupaten
	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel					
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	SS17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	17.01	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	17.01.01	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
					17.01.02	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government
					17.01.03	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel
					17.01.04	Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan
					17.01.05	Menata pusat Pemerintahan Palabuhanratu
					17.01.06	Mendorong terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB)
	SS18	Meningkatnya inovasi daerah	18.01	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	18.01.01	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Berdasarkan arah kebijakan Kabupaten Sukabumi serta untuk mendukung tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2024 yaitu **“Pemantapan daya saing ekonomi melalui peningkatan infrastruktur daerah”**. Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
- 2) Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
- 3) Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan.
- 4) Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
- 5) Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
- 6) Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas layanan publik.

Prioritas pembangunan daerah di atas dirumuskan dari janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan proyek prioritas daerah, serta dukungannya terhadap upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4, 2.5, dan 2.6.

Tabel 2.4. Keterkaitan prioritas pembangunan dengan isu strategis Kabupaten Sukabumi

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan	
1	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	P1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
2	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana	P4	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
3	Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah	P2	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
		P3	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan.
4	Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar	P5	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
5	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	P6	Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan <i>e-government</i> dan kualitas layanan publik.

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Tabel 2.5. Sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan perangkat daerah penanggungjawab pada prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	76,00	Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan dan Pancasila	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan Meningkatkan kualitas pendidik keagamaan Meningkatkan kualitas keimanan siswa	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (AHH) (Tahun)	71,63	Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
			Angka kematian ibu (Per 100.000 KH)	82,00		Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan		
			Angka kematian bayi (Per 1000 KH)	4,15		Meningkatkan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)		

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	87,92	Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan ketahanan keluarga serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Program perlindungan khusus anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun) Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	7,55 12,47	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatkan pemerataan pengelolaan layanan pendidikan dan kualitas kurikulum Meningkatkan akreditasi kelembagaan pendidikan Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan melalui peningkatan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) Meningkatkan minat baca dan belajar tenaga pendidik dan masyarakat	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan (Persen)	22,61	Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	Melestarikan dan mempromosikan objek pemajuan kebudayaan Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan Program pengembangan kesenian tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	8,5-10,5	<p>Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja</p> <p>Memperluas kesempatan kerja</p>	<p>Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non-institusional</p> <p>Menjalin kerjasama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri</p> <p>Optimalisasi <i>Silent Center</i> dalam rangka peningkatan kesempatan kerja</p> <p>Memperluas Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Laki-Laki</p> <p>Meningkatkan Kesempatan Kerja pada Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata</p> <p>Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri</p> <p>Mengoptimalkan peranan stakeholder ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja</p>	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan (Persen)	3,13	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan	Ektensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	percepatan pemulihan ekonomi daerah.	pertanian, dan perikanan				Mengembangkan kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
					Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis	Mencetak <i>agripreneur</i> milenial yang potensial		
					Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian dan	Optimalisasi peranan BUMD dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dan perikanan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
					Optimalisasi peran swasta dan masyarakat melalui kerjasama pengembangan sektor pertanian, dan perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya		
					Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sektor pertanian, dan perikanan	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	86,10		Mengembangkan skema <i>closed loop</i> dalam peningkatan nilai tambah pertanian	Program peningkatan diversifikasi dan	Dinas Ketahanan Pangan

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
					perikanan, yaitu mendorong kemudahan aksesibilitas pembiayaan/permodalan agribisnis bagi para pelaku usaha pertanian dan perikanan	Optimalisasi sektor swasta pada industri hilir komoditas pangan	ketahanan pangan masyarakat	
Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan	Mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu	Meningkatkan penganeakaraman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan					
Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas (Persen)	2,50	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas produk pelaku usaha	Pemetaan Pelaku usaha berbasis skala usaha	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perindustrian dan ESDM		
Meningkatkan kualitas SDM berbasis skala usaha	Mendorong <i>branding</i> produk unggulan daerah							
Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui pendataan pelaku usaha	Mendorong pertumbuhan sentra UMKM dan IKM Optimalisasi peranan kelembagaan koperasi dan BUMD dalam pengembangan usaha							

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
						Mendorong pendirian BPR Syariah dalam mendukung peningkatan akses keuangan Memperluas akses pasar di dalam dan luar negeri		
3	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (Persen)	1 - 2	Membudayakan pelayanan wisata kelas dunia Meningkatkan kualitas daya tarik dan promosi destinasi wisata unggulan	Membangun budaya insan pariwisata berkelas dunia Mengkampanyekan nilai dan spirit kepariwisataan (Setiap kegiatan adalah event, setiap tempat adalah destinasi) Meningkatkan Konsep 3A+2P wisata pada kawasan destinasi unggulan Pengembangan produk wisata unggulan daerah (wisata budaya, wisata halal, wisata religi dan wisata investasi) Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif daerah	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
						Memaksimalkan peranan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan melalui zonasi untuk segmentasi		

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
						<p>Mendorong Kelembagaan Badan Pengelola CPUGG untuk menjadi Badan Usaha independen yang kredibel dan profesional</p> <p>Optimalisasi konsep <i>Community Based Tourism</i> dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis BUMDes</p>		
		Meningkatnya pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata (persen)	3,5	Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang agribisnis dan pariwisata	<p>Memetakan potensi investasi daerah khususnya di bidang agribisnis dan pariwisata</p> <p>Meningkatkan promosi potensi investasi daerah berbasis digital</p> <p>Mendorong sinergi antar sektor dan <i>stakeholder</i> dalam peningkatan investasi daerah</p> <p>Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kemudahan perizinan melalui penguatan implementasi OSS</p>	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (Poin)	68,11	Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup	<p>Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan</p> <p>Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah</p>	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
						berbasis rumah tangga (jakstrada)		
						Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan daerah		
4	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (Persen)	6,60	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
						Meningkatkan pemerataan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
						Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi Masyarakat Miskin		
5	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah (Persen)	88,08	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian	Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE	Program informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
					Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika	Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang		
						Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang		

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
					Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung perluasan cakupan area	Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyediaan layanan jaringan publik		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten (persen)	71,53	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten sesuai target waktu penyelesaian	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum
			Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (Persen)	54,80	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	
		Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata (persen)	26,17	Meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan dasar	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana air minum	Program kawasan permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana sanitasi (persampahan, air limbah domestik, drainase permukiman)			

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
					<p>Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan</p> <p>Meningkatkan ketersediaan RTH/Ruang Publik di kawasan perkotaan</p> <p>Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)</p>	<p>Membangun rumah layak huni untuk masyarakat terdampak bencana dan relokasi akibat pembangunan</p> <p>Mengembangkan kawasan permukiman yang tanggap bencana</p> <p>Meningkatkan kualitas PSU permukiman</p> <p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RTH/Ruang Publik</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan P4T dan percepatan fasilitasi pelayanan bidang pertanahan</p>		
		Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio konektivitas kabupaten (Persen)	60,00	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan transportasi	<p>Meningkatkan Kualitas SDM perhubungan melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang</p> <p>Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi berkeselamatan yang menghubungkan wilayah strategis tingkat kabupaten</p>	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)	Dinas Perhubungan
6	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) (Poin)	87,50	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur	Program pemerintahan dan	Sekretariat Daerah

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	government dan kualitas pelayanan publik	yang profesional dan akuntabel					kesejahteraan rakyat	
			Indeks profesionalisme ASN (Poin)	71,40		Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i>	Program kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (opini)	WTP		Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel	Program pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Nilai akuntabilitas kinerja daerah (Poin)	72,00		Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan		
				Menata pusat Pemerintahan Palabuhanratu				
				Mendorong terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB)		Program administrasi umum	Sekretariat Daerah	
						Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappelitbangda	
		Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah (Poin)	59,00		Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan	Program penelitian dan pengembangan daerah

Tabel 2.6. Dukungan program dan kegiatan pembangunan daerah terhadap pelaksanaan SPM

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target Tahun 2024	Program perangkat daerah	Kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100,00	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) (%)	100,00	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100,00	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100,00	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada (%)	100,00	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamongpraja
6	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
7	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD
8	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
9	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100,00	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target Tahun 2024	Program perangkat daerah	Kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu
					serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
10	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100,00	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
11	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100,00	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
12	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial dasar diluar panti	100,00	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
13	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100,00	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
14	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	94,04	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,58	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memeperoleh rumah layak huni	100,00	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target Tahun 2024	Program perangkat daerah	Kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu
17	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
19	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
20	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
21	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
22	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
23	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target Tahun 2024	Program perangkat daerah	Kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu
24	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
25	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
26	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga Negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
27	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
28	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	JUmlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
29	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan terinfeksi virus yangm melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan beberapa proyek strategis daerah. Proyek ini disusun untuk membuat RPJMD lebih konkrit dalam menjawab isu-isu pembangunan, prioritas pembangunan daerah, dan manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan berdaya ungkit terhadap capaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan dengan proyek prioritas Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Keterkaitan Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan dengan proyek prioritas

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin		
Misi 1:	Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing		
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.	Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Beasiswa pendidikan bagi siswa Hafidz Al-Quran.
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan		Peningkatan kesejahteraan guru dan BOP Madrasah Diniyah (MD)/Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ)
			Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Pontren, MDTA, Majelis Taklim) serta tempat /rumah ibadah (masjid, mushola
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas
			Pelayanan Kesehatan Keliling (Dokter masuk kampung)
			Beasiswa kedokteran
	Menurunnya tingkat pengangguran		Pembangunan RSUD Sukalarang
Pemberdayaan perempuan (PERAHU KERTAS: Perempuan Hebat untuk Keluarga Berkualitas)			
		Peningkatan kecakapan hidup/ <i>Life Skill</i>	
		Pengembangan pusat ketenagakerjaan yang terintegrasi (SILENT Center: <i>Sukabumi Integrated Labour and Employment Center</i>	
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan		Peningkatan BOP PAUD
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal		Pengembangan Pusat Budaya Berbasis Masyarakat (BUMI KURING: <i>Sukabumi Cultural Building</i>)
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial	Pembangunan Rutilahu (Bedah Kampung)
			Jaminan kesehatan masyarakat miskin dan Kades / Perangkat Desa

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
Misi 2:	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah	Penataan Pasar Tradisional (Pasar Semi Modern)
			Pembangunan pasar induk
			Digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan
			Bantuan permodalan untuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM berbasis masjid (BUMI: Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)
			Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan	Penataan destinasi wisata unggulan
	Meningkatnya pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata		Pengembangan wisata budaya
	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi		Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melalui BUMDES
			Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)
			Peningkatan kecakapan hidup/Life Skill
Misi 3:	Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.		
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	<i>Zero Blank Spot Internet Area</i>
	Meningkatnya kualitas infrastruktur		Pembangunan Jalan Lingkar Palabuhanratu – Cisolak
	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman		Pembangunan Jalan Kadudampit – Sukaraja
	Meningkatnya kinerja layanan transportasi		Pembangunan Jalan Nagrak – Cicurug
			Pembangunan Jalan Kebonrandu – Pamuruyan
			Peningkatan jalan penunjang perekonomian (akses sentra produksi, wisata, dan akses ekonomi lainnya)
			Pengembangan infrastruktur pertanian di kawasan LP2B

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
			Pembangunan ruang publik tematik (sarana olahraga, pusat UMKM, ramah gender)
Misi 4:	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.		
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan <i>e-government</i> dan kualitas pelayanan publik	Penataan pusat pemerintahan Palabuhanratu
	Meningkatnya inovasi daerah		Redistribusi pelayanan publik ke Kecamatan hingga Desa
			Pembangunan mall pelayanan publik
			Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)
			Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital
			Peningkatan insentif (Petugas RT dan RW)
			Peningkatan BOP Penyuluh Pertanian

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

2.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024

Rencana kerja dan pendanaan daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target berdasarkan bidang urusan. Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 pada tahun rencana dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi tahun 2024 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana umat, serta hibah.

Ringkasan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, sehingga seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang ingin dicapai. Seluruh program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Tabel 2.7. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
					1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK Sekolah Dasar	%	101,82	103,2	292.400	103,82	1.476.000
		Persentase APK Sekolah Menengah Pertama	%	99,43	100,63	125.450	101,43	657.250
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	51,54	52,74	84.100	53,54	420.500
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	84,1	85,3	24.700	86,1	123.500
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	0,96	57,76	2.100	96,27	10.500
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan PTKnya	%	50,9	51,05	16.600	51,15	83.000
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang belum memiliki izin operasional menjadi memiliki izin operasional	%	73,14	75,24	600	76,64	3.000
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rata-rata nilai peserta didik pada mata pelajaran bahasa sunda	%	7,02	7,41	2.300	7,67	11.500
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	60	66	450.000	70	2.260.000
		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	15	18	180.000	20	918.995
		Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin	%	100	100	8.000	100	40.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	100	100	2.662	100	13.431
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	28	37	6.655	43	33.579
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	59,28	54,8	98.310	58,8	492.146
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	85,08	88,78	100.000	90,90	500.000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sistem Pengelolaan Persampahan	%	9,68	12,90	6.500	21,32	31.500
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	79,76	82,33	50.000	83,84	250.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	%	32,5	47,12	45.000	56,12	225.000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang memiliki PSU kualitas baik	%	8	60	87.500	100	402.500
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang kondisi baik	Unit	27	12	100.000	12	585.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
					1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Unit
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	%	71,42	71,53	463.267	79,53	1.985.285
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	100	100	550	100	2.750
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaran pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	%	80	85,8	2.000	89,6	10.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tidak layak huni akibat bencana dan relokasi pembangunan yang tertangani.	%	100	100	3.000	100	15.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata	%	8,81	26,17	20.000	34,85	100.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	91,88	94,21	87.500	95,65	437.500
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah kawasan perumahan yang memiliki PSU kualitas baik	unit	12	15	6.000	15	30.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95	95	4.968	100	24.387
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	70	2.000	75	9.000
		Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	%	30	50	700	50	3.473
1.05.03		Pesentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	1	1	10.320	1	53.853

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5	5	5.010	5	26.020
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	3.000	100	14.720
		Persentase capaian upaya pendukung terhadap Penataan Sistem dasar penanggulangan Bencana	%	NA	100	400	100	2.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	Menit	15	13	6.903	12	34.991
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	6.444,55	100	24.526
		Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran	%	3,97	4,50	2.134	4,95	11.012
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	8,67	18,91	2.184	18,67	10.985
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	21,63	15,67	50	15,67	250
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS/PMKS yang tertangani dan berfungsi sosial di luar panti.	%	8,55	18,29	6.617	18,29	33.086
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	17,30	16,54	6.176	16,01	28.035
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	100,00	100,00	1.815	100,00	8.943

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
		Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	%	16,55	16,68	793	16,68	3.968
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman makam Pahlawan yang dikelola	%	100,00	100,00	222	100,00	1.149
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90	96	160	100	800
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,1	2,7	7.750	3	38.140
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	27	30	6.140	32	30.545
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	1.930	100	9.500
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai Anugerah Parahyta Ekapraya (APE)	Nilai	80	90	2.885	95	14.327
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0032	0,0032	1.000	0,0032	4.932
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	%	97,99	98,09	5.000	98,15	23.100

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)
					Target		Target	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat akurasi data gender dan anak	%	100,00	100	400	100	1.980
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	12,17	100	1.923	100	9.746
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,01874	0,01874	1.300	0,01874	6.340
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	%	14,29	10	4.500	81,45	20.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%	23,37	38,24	3.500	100	16.200
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	%	14,47	17,11	750	100	4.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	100	100	1.250	100	6.250
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan permasalahan pertanahan	%	100	100	450	100	2.200
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Bidang Tanah / Tahun	9	9	60.000	9	300.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	Persentase Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	%	3	3	600	3	3.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%	0	1	200	3	700
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Percepatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	Bidang Tanah / Tahun	100.386	100386	7.616	100386	38.080
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun per tahun	%	100	100	2.300	100	11.500
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%	68	65	6.600	71	33.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	%	10	10	5.700	10	28.500
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	%	1,73	1,73	2.100	1,73	10.500
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	4,33	4,33	3.100	4,33	15.500

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)
					Target		Target	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina	%	67	100	1.700	100	8.500
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	%	5	5	1.800	5	9.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	%	1,2	1,2	800	1,2	4.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan	%	90	90	1.700	90	8.500
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	50,4	62,4	61.800	70,4	309.000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	76	91	1.000	97,7	4.450
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95	99	1.000	99	4.200
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi/Badan Hukum Indonesia yang bekerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	25	65	1.000	90	5.550
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi yang memanfaatkan Data Profil Kependudukan	%	75	90	150	95	610
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase status desa mandiri	%	5,00	20,73	1.500	19,25	51.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)
					Target		Target	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	%	9,19	13,12	1.500	31,23	6.500
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola dengan Baik	%	12,34	28,08	5.000	15,75	6.500
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Masyarakat Desa yang berprestasi	%	1,05	1,84	15.000	38,58	22.600
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya berusia dibawah 20 Tahun	%	71,2	2,43	5.050	2,35	25.250
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan pemakaian kontrasepsi	%	69,62	68,36	20.300	68,50	101.600
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera yang ber-KB Di Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	82,5	82,76	13.500	83,00	66.500
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio	0,26	0,23	18.496	0,21	92.480
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rasio	0,3	0,75	3.500	1	17.500
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	%	10	60	5.000	100	27.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)
					Target		Target	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	14	65	35.000	100	154.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	NA	100	80	100	400
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntabel	%	1	3	433	5	2.289
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	NA	5	120	5	600
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1	1	607	1	3.139
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	NA	3	271	5	1.402
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	%	0,5	7,5	4141	12,5	27.402
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,2	2,60	1.116	3,70	5.767
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Peta Potensi Investasi Daerah Berbasis Digital	Kecamatan	8	8	1.100	47,00	3.920
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	5	9,74	1.550	53,57	7.595
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	%	90	100	936	100,00	4.776
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Penanaman Modal	%	6	16,23	556	87,66	2.818

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
					2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Investasi yang memenuhi Standar Persyaratan OSS	%
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	%	6	16	2.200	21	10.424
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	%	50	100	22.100	100	114.400
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan	%	0	100.00	2.400	100.00	12.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	16	66	1.000	100	5.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	13	65	900	100	5.200
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	45	100	1.400	100.00	7.000
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Kesenian Tradisional daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	5	20	400	100.00	2.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
					2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Peningkatan Sejarah Lokal yang dibina	%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peningkatan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	%	10	20	400	100.00	2.100
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Layanan Museum terhadap masyarakat	%	10	20	1.100	100.00	4.850
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	NA	6	6.000	7	30.370
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara dan naskah kuno yang diinventarisasi dan dilestarikan	Eksemplar	30	630	1.050	1.030	5.260
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	25	70	1.569	90	6.342
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	%	25	70	2.093	90	8.441
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peningkatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	25	70	242	90	977
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	2	2	28.202	12	133.603
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2	10.710	12	52.239

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	%
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	%	2	2	7.769	2	33.085
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dibangun	%	4	4	35.000	24	156.200
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi Daya Tarik Wisata	%	5	5	8.000	30	38.350
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengembangan Prasarana Dan Ekosistem Ekonomi Kreatif	%	0	20	1.200	100	5.450
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	10	10	2.800	60	14.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100	100	3331	100	16.129
		Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100	100	8855	100	40.301
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100	100	45820	100	228.622
		Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100	100	7485	100	34.596
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	%	5	5	2810	30	11.852

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi	%	0	100	430	100	2.150
		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan yang difasilitasi	%	100	100	350	100	1.750
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian	%	0	100	350	100	1.750
		Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha peternakan	%	0	100	540	100	2.736
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	7327	100	41.100
		Persentase kelembagaan peternak yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	890	100	4.440
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase layanan fasilitasi izin pemanfaatan panas bumi daerah	%	100	100	750	100	3.750
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran perusahaan yang Difasilitasi	%	0	100	500	100	2.400
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	4.216	100	21.332
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah	%	100	100	620	100	3.134
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Produk daerah Siap Ekspor	%	0	12	1.336	24	6.863

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
					3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku)	%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk unggulan Lokal yang masuk pusat sarana distribusi perdagangan	Unit	0	18	504	22	2.605
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah IKM Mandiri	%	9,1	9,81	40.000	10,29	195.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Jumlah perusahaan yang memiliki izin usaha	%	1,34	1,96	550	2	2.750
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase IKM yang melaporkan data industry melalui akun SIINAS	%	100	100	400	100	2.000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20	20	135	100	700
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	16,6	20,4	350	100	1.750
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	11	13	3.950	14	17.200
		Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana	%	100	100	3.450	100	15.150
		Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu	%	100	100	40.450	100	198.480

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah	%	88	89,5	29.100	92	145.500
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skoring LPPD Kabupaten	Poin	3,62	3,7	1.900	4	9.275
		Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	%	100	100	1.700	100	8.625
		Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	%	75	75	1.150	75	6.025
		Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%	100	100	71.050	100	326.750
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian yang terlaksana	%	100	100	2.675	100	12.475
		Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi	%	95	97	900	98	4.500
		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Predikat	Proaktif	Strategis	1.900	Unggul	8.600
		Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi sumber daya alam berwawasan lingkungan	%	9	27	1.150	27	5.825
4.02	SEKRETARIAT DPRD							
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Persidangan dan Perundang-undangan	%	95	95	2.600	95	13.000
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Umum	%	95	95	48.975	95	213.475
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran	%	95	95	9.625	95	48.125
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)
					Target		Target	
5.01	PERENCANAAN							
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	2.700	100	13.200
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	24,91	25,76	1.890	26,24	7.181
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		26,29	26,57	1.750	27,05	7.700
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		25,67	26,84	1.750	27,32	7.877
5.02	KEUANGAN							
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketercapaian mandatory APBD	%	100	100	3.727	100	18.803
		Persentase realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah daerah terhadap pendapatan daerah	%	92	93,5	751.805	94,5	3.756.025
		Persentase ketercapaian penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	%	100	100	1.997	100	10.074
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Aset daerah	%	100	100	4.792	100	24.177
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	28,24	4,73	13.623	3,13	69.003
5.03	KEPEGAWAIAN							
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai dimensi kualifikasi	Nilai	13,13	13,4	2.250	13,5	11.113
		Persentase Pemenuhan Pegawai Akibat Pemberhentian	%	100	100	3.294	100	15.706

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)
					Target		Target	
		Persentase Ketersuaian Jabatan dengan Kualifikasi dan Kompetensi	%	100	100	2.160	100	10.620
		Nilai Dimensi Disiplin dan Kinerja	Nilai	27	28	2.110,8	29	10.419
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi ASN	Nilai	10,88	30	15.432	35	75.400
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/diimplementasikan	%	NA	62,5	2.050	87,50	9.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3,3	4.094	3,50	20.587
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	1.297	3	6.533
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	%	89,4	92,13	7.050	93,32	35.250
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	100,00	7.050	100,00	35.250
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	%	80	20,00	4.700	0,00	23.500

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)
					Target		Target	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100,00	4.700	100,00	23.500
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	%	89,4	92,13	4.700	93,32	23.500
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	indeks	80	82,5	2.823	83,5	13.846
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	75,5	77	323.453	78	397.847
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Profesionalisme Ormas	Indeks	70	71,5	3.728	72,5	17.814
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Indeks	69	70,5	5.689	71,5	31.967
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	%	10	25	23.777	35	58.894

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2024		Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2026	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
						PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
X	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA *	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	30.444	100	138.996
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1.756.794	100	8.409.006
		Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, serta perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100	58.888	100	269.992
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	59.549	100	274.476
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	109.679	100	537.116
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	59.888	100	273.992
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	30.460	100	134.140
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	20.096	100	88.584

Tabel 2.8. Rekapitulasi indikasi pagu perangkat daerah per program pada RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	DINAS PENDIDIKAN	1.398.579.359.453,00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	793.025.714.333	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	561.815.045.120,00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	949.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	40.289.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	899.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.598.790.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN	335.646.355.681,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	145.607.437.392,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	156.915.283.089,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.273.149.200,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	894.058.000,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	956.428.000,00	DINAS KESEHATAN
3	UPTD RSUD PALABUHANRATU	157.930.500.000,00	UPTD RSUD PALABUHANRATU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.454.640.000,00	UPTD RSUD PALABUHANRATU
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.475.860.000,00	UPTD RSUD PALABUHANRATU
4	UPTD RSUD SEKARWANGI	180.800.000.000,00	UPTD RSUD SEKARWANGI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.008.960.579,00	UPTD RSUD SEKARWANGI
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	38.691.039.421,00	UPTD RSUD SEKARWANGI
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100.000.000,00	UPTD RSUD SEKARWANGI
5	UPTD PUSKESMAS KARAWANG	2.088.001.797,00	UPTD PUSKESMAS KARAWANG

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.113.401.797,00	UPTD PUSKESMAS KARAWANG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	935.011.500,00	UPTD PUSKESMAS KARAWANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	39.588.500,00	UPTD PUSKESMAS KARAWANG
6	UPTD PUSKESMAS SUKARAJA	3.728.702.848,00	UPTD PUSKESMAS SUKARAJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.033.106.848,00	UPTD PUSKESMAS SUKARAJA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	646.006.000,00	UPTD PUSKESMAS SUKARAJA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	49.590.000,00	UPTD PUSKESMAS SUKARAJA
7	UPTD PUSKESMAS LIMBANGAN	2.404.626.858,00	UPTD PUSKESMAS LIMBANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.571.029.858,00	UPTD PUSKESMAS LIMBANGAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	778.507.000,00	UPTD PUSKESMAS LIMBANGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	55.090.000,00	UPTD PUSKESMAS LIMBANGAN
8	UPTD PUSKESMAS KEBONPEDES	2.555.538.023,00	UPTD PUSKESMAS KEBONPEDES
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.804.228.023,00	UPTD PUSKESMAS KEBONPEDES
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	681.840.000,00	UPTD PUSKESMAS KEBONPEDES
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	69.470.000,00	UPTD PUSKESMAS KEBONPEDES
9	UPTD PUSKESMAS CIREUNGHAS	3.006.040.977,00	UPTD PUSKESMAS CIREUNGHAS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.287.653.977,00	UPTD PUSKESMAS CIREUNGHAS
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	686.147.000,00	UPTD PUSKESMAS CIREUNGHAS

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32.240.000,00	UPTD PUSKESMAS CIREUNGHAS
10	UPTD PUSKESMAS SUKALARANG	3.641.890.894,00	UPTD PUSKESMAS SUKALARANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.560.640.894,00	UPTD PUSKESMAS SUKALARANG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.025.990.000,00	UPTD PUSKESMAS SUKALARANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	55.260.000,00	UPTD PUSKESMAS SUKALARANG
11	UPTD PUSKESMAS GEGERBITUNG	3.485.282.043,00	UPTD PUSKESMAS GEGERBITUNG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.658.533.043,00	UPTD PUSKESMAS GEGERBITUNG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	793.160.500,00	UPTD PUSKESMAS GEGERBITUNG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.588.500,00	UPTD PUSKESMAS GEGERBITUNG
12	UPTD PUSKESMAS NYALINDUNG	2.203.489.899,00	UPTD PUSKESMAS NYALINDUNG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.217.527.899,00	UPTD PUSKESMAS NYALINDUNG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	926.952.000,00	UPTD PUSKESMAS NYALINDUNG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	59.010.000,00	UPTD PUSKESMAS NYALINDUNG
13	UPTD PUSKESMAS CIJANGKAR	1.888.047.193,00	UPTD PUSKESMAS CIJANGKAR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.197.474.193,00	UPTD PUSKESMAS CIJANGKAR
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	655.523.000,00	UPTD PUSKESMAS CIJANGKAR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.050.000,00	UPTD PUSKESMAS CIJANGKAR
14	UPTD PUSKESMAS PURABAYA	3.500.525.901,00	UPTD PUSKESMAS PURABAYA

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.636.837.901,00	UPTD PUSKESMAS PURABAYA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	846.708.000,00	UPTD PUSKESMAS PURABAYA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.980.000,00	UPTD PUSKESMAS PURABAYA
15	UPTD PUSKESMAS SAGARANTEN	3.132.105.654,00	UPTD PUSKESMAS SAGARANTEN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.253.670.654,00	UPTD PUSKESMAS SAGARANTEN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	803.642.000,00	UPTD PUSKESMAS SAGARANTEN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	74.793.000,00	UPTD PUSKESMAS SAGARANTEN
16	UPTD PUSKESMAS CIDOLOG	1.159.031.711,00	UPTD PUSKESMAS CIDOLOG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	445.696.711,00	UPTD PUSKESMAS CIDOLOG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	667.030.000,00	UPTD PUSKESMAS CIDOLOG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	46.305.000,00	UPTD PUSKESMAS CIDOLOG
17	UPTD PUSKESMAS CIDADAP	1.724.377.123,00	UPTD PUSKESMAS CIDADAP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	885.403.123,00	UPTD PUSKESMAS CIDADAP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	771.684.000,00	UPTD PUSKESMAS CIDADAP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	67.290.000,00	UPTD PUSKESMAS CIDADAP
18	UPTD PUSKESMAS CURUGKEMBAR	2.216.847.556,00	UPTD PUSKESMAS CURUGKEMBAR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.450.833.556,00	UPTD PUSKESMAS CURUGKEMBAR
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	737.664.000,00	UPTD PUSKESMAS CURUGKEMBAR

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28.350.000,00	UPTD PUSKESMAS CURUGKEMBAR
19	UPTD PUSKESMAS PABUARAN	2.625.244.249,00	UPTD PUSKESMAS PABUARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.711.987.249,00	UPTD PUSKESMAS PABUARAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	903.177.000,00	UPTD PUSKESMAS PABUARAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.080.000,00	UPTD PUSKESMAS PABUARAN
20	UPTD PUSKESMAS BANGBAYANG	1.019.643.603,00	UPTD PUSKESMAS BANGBAYANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	311.444.603,00	UPTD PUSKESMAS BANGBAYANG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	682.579.000,00	UPTD PUSKESMAS BANGBAYANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	25.620.000,00	UPTD PUSKESMAS BANGBAYANG
21	UPTD PUSKESMAS TEGALBULEUD	1.989.016.628,00	UPTD PUSKESMAS TEGALBULEUD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.364.099.628,00	UPTD PUSKESMAS TEGALBULEUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	605.787.000,00	UPTD PUSKESMAS TEGALBULEUD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.130.000,00	UPTD PUSKESMAS TEGALBULEUD
22	UPTD PUSKESMAS CIBITUNG	2.228.426.441,00	UPTD PUSKESMAS CIBITUNG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.455.529.441,00	UPTD PUSKESMAS CIBITUNG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	739.257.000,00	UPTD PUSKESMAS CIBITUNG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.640.000,00	UPTD PUSKESMAS CIBITUNG
23	UPTD PUSKESMAS SURADE	3.355.252.887,00	UPTD PUSKESMAS SURADE

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.419.210.887,00	UPTD PUSKESMAS SURADE
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	924.142.000,00	UPTD PUSKESMAS SURADE
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.900.000,00	UPTD PUSKESMAS SURADE
24	UPTD PUSKESMAS BUNIWANGI	2.205.654.554,00	UPTD PUSKESMAS BUNIWANGI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.369.276.554,00	UPTD PUSKESMAS BUNIWANGI
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	768.778.000,00	UPTD PUSKESMAS BUNIWANGI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	67.600.000,00	UPTD PUSKESMAS BUNIWANGI
25	UPTD PUSKESMAS CIRACAP	3.505.500.367,00	UPTD PUSKESMAS CIRACAP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.651.468.367,00	UPTD PUSKESMAS CIRACAP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	789.532.000,00	UPTD PUSKESMAS CIRACAP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	64.500.000,00	UPTD PUSKESMAS CIRACAP
26	UPTD PUSKESMAS CIEMAS	1.918.761.338,00	UPTD PUSKESMAS CIEMAS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.185.956.338,00	UPTD PUSKESMAS CIEMAS
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	673.305.000,00	UPTD PUSKESMAS CIEMAS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	59.500.000,00	UPTD PUSKESMAS CIEMAS
27	UPTD PUSKESMAS TAMANJAYA	2.305.446.210,00	UPTD PUSKESMAS TAMANJAYA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.383.569.210,00	UPTD PUSKESMAS TAMANJAYA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	883.639.000,00	UPTD PUSKESMAS TAMANJAYA

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	38.238.000,00	UPTD PUSKESMAS TAMANJAYA
28	UPTD PUSKESMAS WALURAN	2.642.267.510,00	UPTD PUSKESMAS WALURAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.573.338.510,00	UPTD PUSKESMAS WALURAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.016.829.000,00	UPTD PUSKESMAS WALURAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52.100.000,00	UPTD PUSKESMAS WALURAN
29	UPTD PUSKESMAS JAMPANGKULON	3.484.454.735,00	UPTD PUSKESMAS JAMPANGKULON
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.617.636.735,00	UPTD PUSKESMAS JAMPANGKULON
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	808.518.000,00	UPTD PUSKESMAS JAMPANGKULON
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	58.300.000,00	UPTD PUSKESMAS JAMPANGKULON
30	UPTD PUSKESMAS KALIBUNDER	2.400.854.422,00	UPTD PUSKESMAS KALIBUNDER
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.610.693.422,00	UPTD PUSKESMAS KALIBUNDER
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	789.441.000,00	UPTD PUSKESMAS KALIBUNDER
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	720.000,00	UPTD PUSKESMAS KALIBUNDER
31	UPTD PUSKESMAS CIMANGGU	2.279.091.794,00	UPTD PUSKESMAS CIMANGGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.341.308.794,00	UPTD PUSKESMAS CIMANGGU
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	900.043.000,00	UPTD PUSKESMAS CIMANGGU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	37.740.000,00	UPTD PUSKESMAS CIMANGGU
32	UPTD PUSKESMAS WARUNGIARA	4.371.593.773,00	UPTD PUSKESMAS WARUNGIARA

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.225.025.773,00	UPTD PUSKESMAS WARUNGKIARA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.082.218.300,00	UPTD PUSKESMAS WARUNGKIARA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	64.349.700,00	UPTD PUSKESMAS WARUNGKIARA
33	UPTD PUSKESMAS BANTARGADUNG	3.247.173.964,00	UPTD PUSKESMAS BANTARGADUNG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.532.771.964,00	UPTD PUSKESMAS BANTARGADUNG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	679.662.000,00	UPTD PUSKESMAS BANTARGADUNG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34.740.000,00	UPTD PUSKESMAS BANTARGADUNG
34	UPTD PUSKESMAS CITARIK	4.279.975.751,00	UPTD PUSKESMAS CITARIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.412.486.751,00	UPTD PUSKESMAS CITARIK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	810.619.000,00	UPTD PUSKESMAS CITARIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	56.870.000,00	UPTD PUSKESMAS CITARIK
35	UPTD PUSKESMAS SIMPENAN	4.235.105.251,00	UPTD PUSKESMAS SIMPENAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.284.294.251,00	UPTD PUSKESMAS SIMPENAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	924.631.000,00	UPTD PUSKESMAS SIMPENAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	26.180.000,00	UPTD PUSKESMAS SIMPENAN
36	UPTD PUSKESMAS PALABUHANRATU	4.596.360.831,00	UPTD PUSKESMAS PALABUHANRATU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.723.059.831,00	UPTD PUSKESMAS PALABUHANRATU
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	850.321.000,00	UPTD PUSKESMAS PALABUHANRATU

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.980.000,00	UPTD PUSKESMAS PALABUHANRATU
37	UPTD PUSKESMAS CIKAKAK	3.786.429.351,00	UPTD PUSKESMAS CIKAKAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.884.539.351,00	UPTD PUSKESMAS CIKAKAK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	854.200.000,00	UPTD PUSKESMAS CIKAKAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	47.690.000,00	UPTD PUSKESMAS CIKAKAK
38	UPTD PUSKESMAS CISOLOK	5.584.255.619,00	UPTD PUSKESMAS CISOLOK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.275.886.619,00	UPTD PUSKESMAS CISOLOK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.285.609.000,00	UPTD PUSKESMAS CISOLOK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.760.000,00	UPTD PUSKESMAS CISOLOK
39	UPTD PUSKESMAS CIKIDANG	4.883.171.694,00	UPTD PUSKESMAS CIKIDANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.978.816.694,00	UPTD PUSKESMAS CIKIDANG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	857.495.000,00	UPTD PUSKESMAS CIKIDANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	46.860.000,00	UPTD PUSKESMAS CIKIDANG
40	UPTD PUSKESMAS KABANDUNGAN	3.887.777.300,00	UPTD PUSKESMAS KABANDUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.992.446.300,00	UPTD PUSKESMAS KABANDUNGAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	869.246.000,00	UPTD PUSKESMAS KABANDUNGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	26.085.000,00	UPTD PUSKESMAS KABANDUNGAN
41	UPTD PUSKESMAS KALAPANUNGGAL	4.129.643.155,00	UPTD PUSKESMAS KALAPANUNGGAL

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.154.431.155,00	UPTD PUSKESMAS KALAPANUNGGAL
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	921.490.000,00	UPTD PUSKESMAS KALAPANUNGGAL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	53.722.000,00	UPTD PUSKESMAS KALAPANUNGGAL
42	UPTD PUSKESMAS BOJONGGENTENG	2.998.868.043,00	UPTD PUSKESMAS BOJONGGENTENG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.242.224.043,00	UPTD PUSKESMAS BOJONGGENTENG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	749.024.000,00	UPTD PUSKESMAS BOJONGGENTENG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.620.000,00	UPTD PUSKESMAS BOJONGGENTENG
43	UPTD PUSKESMAS PARAKANSALAK	3.267.190.260,00	UPTD PUSKESMAS PARAKANSALAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.421.067.260,00	UPTD PUSKESMAS PARAKANSALAK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	829.742.400,00	UPTD PUSKESMAS PARAKANSALAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.380.600,00	UPTD PUSKESMAS PARAKANSALAK
44	UPTD PUSKESMAS PARUNGKUDA	4.285.044.944,00	UPTD PUSKESMAS PARUNGKUDA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.479.017.944,00	UPTD PUSKESMAS PARUNGKUDA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	733.567.000,00	UPTD PUSKESMAS PARUNGKUDA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	72.460.000,00	UPTD PUSKESMAS PARUNGKUDA
45	UPTD PUSKESMAS CIDAHU	4.079.462.032,00	UPTD PUSKESMAS CIDAHU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.146.899.032,00	UPTD PUSKESMAS CIDAHU
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	917.833.000,00	UPTD PUSKESMAS CIDAHU

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.730.000,00	UPTD PUSKESMAS CIDAHU
46	UPTD PUSKESMAS CICURUG	5.184.055.151,00	UPTD PUSKESMAS CICURUG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.011.138.151,00	UPTD PUSKESMAS CICURUG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.155.537.000,00	UPTD PUSKESMAS CICURUG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.380.000,00	UPTD PUSKESMAS CICURUG
47	UPTD PUSKESMAS CIPARI	1.348.153.307,00	UPTD PUSKESMAS CIPARI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	589.506.307,00	UPTD PUSKESMAS CIPARI
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	746.564.000,00	UPTD PUSKESMAS CIPARI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.083.000,00	UPTD PUSKESMAS CIPARI
48	UPTD PUSKESMAS CIAMBAR	2.931.501.015,00	UPTD PUSKESMAS CIAMBAR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.943.686.015,00	UPTD PUSKESMAS CIAMBAR
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	933.863.000,00	UPTD PUSKESMAS CIAMBAR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	53.952.000,00	UPTD PUSKESMAS CIAMBAR
49	UPTD PUSKESMAS GIRIJAYA	2.185.639.832,00	UPTD PUSKESMAS GIRIJAYA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.405.665.832,00	UPTD PUSKESMAS GIRIJAYA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	749.984.000,00	UPTD PUSKESMAS GIRIJAYA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	29.990.000,00	UPTD PUSKESMAS GIRIJAYA
50	UPTD PUSKESMAS NAGRAK	3.862.050.026,00	UPTD PUSKESMAS NAGRAK

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.895.630.026,00	UPTD PUSKESMAS NAGRAK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	938.450.000,00	UPTD PUSKESMAS NAGRAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.970.000,00	UPTD PUSKESMAS NAGRAK
51	UPTD PUSKESMAS SEKARWANGI	3.751.585.560,00	UPTD PUSKESMAS SEKARWANGI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.967.805.560,00	UPTD PUSKESMAS SEKARWANGI
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	738.510.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKARWANGI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	45.270.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKARWANGI
52	UPTD PUSKESMAS CIBADAK	3.816.656.832,00	UPTD PUSKESMAS CIBADAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.908.310.832,00	UPTD PUSKESMAS CIBADAK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	874.566.000,00	UPTD PUSKESMAS CIBADAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.780.000,00	UPTD PUSKESMAS CIBADAK
53	UPTD PUSKESMAS CICANTAYAN	3.145.188.587,00	UPTD PUSKESMAS CICANTAYAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.235.734.587,00	UPTD PUSKESMAS CICANTAYAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	876.214.000,00	UPTD PUSKESMAS CICANTAYAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.240.000,00	UPTD PUSKESMAS CICANTAYAN
54	UPTD PUSKESMAS CARINGIN	3.646.891.113,00	UPTD PUSKESMAS CARINGIN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.848.129.113,00	UPTD PUSKESMAS CARINGIN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	767.402.000,00	UPTD PUSKESMAS CARINGIN

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.360.000,00	UPTD PUSKESMAS CARINGIN
55	UPTD PUSKESMAS CISAAT	5.045.773.572,00	UPTD PUSKESMAS CISAAT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.915.806.572,00	UPTD PUSKESMAS CISAAT
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.077.047.000,00	UPTD PUSKESMAS CISAAT
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52.920.000,00	UPTD PUSKESMAS CISAAT
56	UPTD PUSKESMAS SELAJAMBE	1.878.161.565,00	UPTD PUSKESMAS SELAJAMBE
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.080.101.565,00	UPTD PUSKESMAS SELAJAMBE
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	757.640.000,00	UPTD PUSKESMAS SELAJAMBE
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	40.420.000,00	UPTD PUSKESMAS SELAJAMBE
57	UPTD PUSKESMAS CIBOLANG	1.547.476.706,00	UPTD PUSKESMAS CIBOLANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	878.728.706,00	UPTD PUSKESMAS CIBOLANG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	616.748.000,00	UPTD PUSKESMAS CIBOLANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52.000.000,00	UPTD PUSKESMAS CIBOLANG
58	UPTD PUSKESMAS KADUDAMPIT	4.473.300.289,00	UPTD PUSKESMAS KADUDAMPIT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.252.762.289,00	UPTD PUSKESMAS KADUDAMPIT
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.177.428.000,00	UPTD PUSKESMAS KADUDAMPIT
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	43.110.000,00	UPTD PUSKESMAS KADUDAMPIT
59	UPTD PUSKESMAS LENGKONG	3.022.449.735,00	UPTD PUSKESMAS LENGKONG

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.069.005.735,00	UPTD PUSKESMAS LENGKONG
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	928.548.000,00	UPTD PUSKESMAS LENGKONG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.896.000,00	UPTD PUSKESMAS LENGKONG
69	UPTD PUSKESMAS JAMPANGTENGAH	4.095.420.422,00	UPTD PUSKESMAS JAMPANGTENGAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.008.322.422,00	UPTD PUSKESMAS JAMPANGTENGAH
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.054.278.000,00	UPTD PUSKESMAS JAMPANGTENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32.820.000,00	UPTD PUSKESMAS JAMPANGTENGAH
70	UPTD PUSKESMAS GUNUNGGURUH	2.385.199.494,00	UPTD PUSKESMAS GUNUNGGURUH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.559.540.494,00	UPTD PUSKESMAS GUNUNGGURUH
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	814.349.000,00	UPTD PUSKESMAS GUNUNGGURUH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.310.000,00	UPTD PUSKESMAS GUNUNGGURUH
71	UPTD PUSKESMAS CIKEMBAR	4.228.615.611,00	UPTD PUSKESMAS CIKEMBAR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.893.725.611,00	UPTD PUSKESMAS CIKEMBAR
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.274.560.000,00	UPTD PUSKESMAS CIKEMBAR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60.330.000,00	UPTD PUSKESMAS CIKEMBAR
72	UPTD GUDANG FARMASI	50.000.000,00	UPTD GUDANG FARMASI
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	UPTD GUDANG FARMASI
73	UPTD LABKESDA	470.000.000,00	UPTD LABKESDA

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.000.000,00	UPTD LABKESDA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70.000.000,00	UPTD LABKESDA
74	UPTD RSUD SAGARANTEN	10.545.000.000,00	UPTD RSUD SAGARANTEN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.793.000.000,00	UPTD RSUD SAGARANTEN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.752.000.000,00	UPTD RSUD SAGARANTEN
75	DINAS PEKERJAAN UMUM	157.201.088.888,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.613.276.273,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	31.472.498.699,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.615.313.916,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
76	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	222.103.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	50.592.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.230.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.402.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	63.308.667.368,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	35.332.852.632,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.952.475.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.781.325.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.113.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	20.138.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.241.680.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
77	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	24.145.439.862,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.538.677.862,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.606.762.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.116.157.457,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.696.161.647,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	10.386.833.010,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.162.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
79	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.154.369.722,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.383.619.722,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	770.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
80	DINAS SOSIAL	18.302.413.961,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.888.220.761,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.479.454.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.634.500.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.324.369.600,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	857.418.000,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	103.451.600,00	DINAS SOSIAL

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
81	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.256.063.710,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.726.063.710,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	470.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	625.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	492.638.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	390.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	107.362.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
83	DINAS KETAHANAN PANGAN	7.823.627.936,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.327.814.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	600.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	865.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	205.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	451.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.373.313.036,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
84	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	35.881.591.925,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	305.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.326.591.925,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	30.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	54.872.970.407,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	199.999.668,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.293.254.239,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	990.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	560.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	32.394.716.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.008.035.043,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.862.091.793,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	288.444.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	308.292.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	499.266.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.940.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
87	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.042.559.775,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.722.559.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENATAAN DESA	310.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	455.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	12.404.999.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
88	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	48.383.305.234,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.944.834,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	175.369.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	18.044.991.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	14.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
89	DINAS PERHUBUNGAN	50.484.926.608,00	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.564.918.939,00	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.064.207.669,00	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.847.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
90	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	20.573.955.640,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.753.149.240,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.889.682.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.691.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	440.124.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.050.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
91	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.455.816.930,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.935.906.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.522.746.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	425.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.672.164.730,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
92	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.539.219.107,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.288.578.107,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	488.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.254.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	812.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	594.891.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
93	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	37.079.963.807,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.317.273.807,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.290.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	24.155.028.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.215.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	172.162.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	965.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
94	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	16.449.594.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.302.322.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	399.300.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.434.500,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	831.451.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1.436.151.500,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	266.200.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.112.735.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
95	DINAS PERIKANAN	22.110.662.586,00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.263.647.386,00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.319.127.200,00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.248.220.000,00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	175.640.000,00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.104.028.000,00	DINAS PERIKANAN
96	DINAS PARIWISATA	25.202.247.713,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.705.549.566,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.661.462.147,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.320.461.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	409.590.000,00	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.105.185.000,00	DINAS PARIWISATA
97	DINAS PETERNAKAN	30.043.449.921,00	DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.580.564.271,00	DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.514.083.800,00	DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.880.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.908.377.750,00	DINAS PETERNAKAN

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	475.424.100,00	DINAS PETERNAKAN
98	DINAS PERTANIAN	92.232.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.331.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	45.820.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	430.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	650.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.326.999.000,00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.674.001.000,00	DINAS PERTANIAN
99	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	38.580.207.391,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.758.165.391,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	675.585.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.020.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.115.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	663.159.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	582.223.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.165.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.825.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
100	SEKRETARIAT DAERAH	98.194.431.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.719.431.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	32.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.075.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
101	SEKRETARIAT DPRD	64.982.210.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.592.156.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.390.054.300,00	SEKRETARIAT DPRD
102	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	23.640.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.390.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
103	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	766.866.945.134,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.678.557.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	694.396.387.734,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.791.999.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
104	BADAN PENDAPATAN DAERAH	28.268.124.928,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.310.817.728,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.957.307.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
105	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.046.916.326,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.338.261.326,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.810.233.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.898.422.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
106	INSPEKTORAT	16.939.201.640,00	INSPEKTORAT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.737.644.640,00	INSPEKTORAT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.945.499.000,00	INSPEKTORAT
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	256.058.000,00	INSPEKTORAT
107	KECAMATAN BANTARGADUNG	2.369.628.233,00	KECAMATAN BANTARGADUNG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.281.633.233,00	KECAMATAN BANTARGADUNG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.995.000,00	KECAMATAN BANTARGADUNG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000,00	KECAMATAN BANTARGADUNG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	KECAMATAN BANTARGADUNG

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	KECAMATAN BANTARGADUNG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.000.000,00	KECAMATAN BANTARGADUNG
108	KECAMATAN BOJONGGENTENG	2.307.934.557,00	KECAMATAN BOJONGGENTENG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.217.434.557,00	KECAMATAN BOJONGGENTENG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.500.000,00	KECAMATAN BOJONGGENTENG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.500.000,00	KECAMATAN BOJONGGENTENG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.500.000,00	KECAMATAN BOJONGGENTENG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.500.000,00	KECAMATAN BOJONGGENTENG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.500.000,00	KECAMATAN BOJONGGENTENG
109	KECAMATAN CARINGIN	3.485.448.004,00	KECAMATAN CARINGIN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.413.511.004,00	KECAMATAN CARINGIN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.848.000,00	KECAMATAN CARINGIN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.117.000,00	KECAMATAN CARINGIN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.667.000,00	KECAMATAN CARINGIN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.650.000,00	KECAMATAN CARINGIN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.655.000,00	KECAMATAN CARINGIN
110	KECAMATAN CIAMBAR	2.517.996.471,00	KECAMATAN CIAMBAR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.436.046.471,00	KECAMATAN CIAMBAR

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.200.000,00	KECAMATAN CIAMBAR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.200.000,00	KECAMATAN CIAMBAR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.750.000,00	KECAMATAN CIAMBAR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.500.000,00	KECAMATAN CIAMBAR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.300.000,00	KECAMATAN CIAMBAR
111	KECAMATAN CIBADAK	5.647.797.333,00	KECAMATAN CIBADAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.705.448.163,00	KECAMATAN CIBADAK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.100.000,00	KECAMATAN CIBADAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	796.099.170,00	KECAMATAN CIBADAK
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.050.000,00	KECAMATAN CIBADAK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.050.000,00	KECAMATAN CIBADAK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.050.000,00	KECAMATAN CIBADAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.000.000,00	KECAMATAN CIBADAK
112	KECAMATAN CIBITUNG	2.387.709.109,00	KECAMATAN CIBITUNG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.005.000,00	KECAMATAN CIBITUNG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.880.000,00	KECAMATAN CIBITUNG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.016.000,00	KECAMATAN CIBITUNG

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.005.000,00	KECAMATAN CIBITUNG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.005.000,00	KECAMATAN CIBITUNG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.010.000,00	KECAMATAN CIBITUNG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.337.788.109,00	KECAMATAN CIBITUNG
113	KECAMATAN CICANTAYAN	2.815.136.966,00	KECAMATAN CICANTAYAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.719.786.966,00	KECAMATAN CICANTAYAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000,00	KECAMATAN CICANTAYAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	KECAMATAN CICANTAYAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.070.000,00	KECAMATAN CICANTAYAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.862.000,00	KECAMATAN CICANTAYAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	KECAMATAN CICANTAYAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.418.000,00	KECAMATAN CICANTAYAN
114	KECAMATAN CICURUG	4.991.811.775,00	KECAMATAN CICURUG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.853.020.775,00	KECAMATAN CICURUG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.446.000,00	KECAMATAN CICURUG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.025.265.000,00	KECAMATAN CICURUG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.950.000,00	KECAMATAN CICURUG

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.850.000,00	KECAMATAN CICURUG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.280.000,00	KECAMATAN CICURUG
115	KECAMATAN CIDADAP	3.104.936.631,00	KECAMATAN CIDADAP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.982.406.631,00	KECAMATAN CIDADAP
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.548.000,00	KECAMATAN CIDADAP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.010.000,00	KECAMATAN CIDADAP
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.624.000,00	KECAMATAN CIDADAP
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.724.000,00	KECAMATAN CIDADAP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.624.000,00	KECAMATAN CIDADAP
116	KECAMATAN CIDAHU	2.351.117.982,00	KECAMATAN CIDAHU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.836.000,00	KECAMATAN CIDAHU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.628.000,00	KECAMATAN CIDAHU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.824.000,00	KECAMATAN CIDAHU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.736.000,00	KECAMATAN CIDAHU
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.536.000,00	KECAMATAN CIDAHU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.256.557.982,00	KECAMATAN CIDAHU
117	KECAMATAN CIDOLOG	2.344.635.335,00	KECAMATAN CIDOLOG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.285.471.335,00	KECAMATAN CIDOLOG

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.000.000,00	KECAMATAN CIDOLOG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.200.000,00	KECAMATAN CIDOLOG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000,00	KECAMATAN CIDOLOG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.200.000,00	KECAMATAN CIDOLOG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.764.000,00	KECAMATAN CIDOLOG
118	KECAMATAN CIEMAS	2.344.947.489,00	KECAMATAN CIEMAS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.291.947.489,00	KECAMATAN CIEMAS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.000.000,00	KECAMATAN CIEMAS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.000.000,00	KECAMATAN CIEMAS
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000,00	KECAMATAN CIEMAS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000,00	KECAMATAN CIEMAS
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.000.000,00	KECAMATAN CIEMAS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.000.000,00	KECAMATAN CIEMAS
119	KECAMATAN CIKAKAK	2.618.914.200,00	KECAMATAN CIKAKAK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.950.000,00	KECAMATAN CIKAKAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.000.000,00	KECAMATAN CIKAKAK
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.975.000,00	KECAMATAN CIKAKAK

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	KECAMATAN CIKAKAK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.975.000,00	KECAMATAN CIKAKAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.554.014.200,00	KECAMATAN CIKAKAK
120	KECAMATAN CIKEMBAR	2.952.293.930,00	KECAMATAN CIKEMBAR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.909.403.930,00	KECAMATAN CIKEMBAR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	KECAMATAN CIKEMBAR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.890.000,00	KECAMATAN CIKEMBAR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN CIKEMBAR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN CIKEMBAR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	KECAMATAN CIKEMBAR
121	KECAMATAN CIKIDANG	2.959.040.119,00	KECAMATAN CIKIDANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.145.932.119,00	KECAMATAN CIKIDANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.800.000,00	KECAMATAN CIKIDANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.660.000,00	KECAMATAN CIKIDANG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.040.000,00	KECAMATAN CIKIDANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.600.000,00	KECAMATAN CIKIDANG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.640.000,00	KECAMATAN CIKIDANG

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	643.368.000,00	KECAMATAN CIKIDANG
123	KECAMATAN CIMANGGU	2.647.722.662,00	KECAMATAN CIMANGGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.090.717.062,00	KECAMATAN CIMANGGU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.720.000,00	KECAMATAN CIMANGGU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGU
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	513.285.600,00	KECAMATAN CIMANGGU
124	KECAMATAN CIRACAP	2.608.034.144,00	KECAMATAN CIRACAP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.570.693.144,00	KECAMATAN CIRACAP
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.341.000,00	KECAMATAN CIRACAP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000,00	KECAMATAN CIRACAP
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN CIRACAP
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN CIRACAP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	KECAMATAN CIRACAP
125	KECAMATAN CIREUNGHAS	3.158.377.350,00	KECAMATAN CIREUNGHAS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.123.750.850,00	KECAMATAN CIREUNGHAS

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.976.000,00	KECAMATAN CIREUNGHAS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.792.000,00	KECAMATAN CIREUNGHAS
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.983.000,00	KECAMATAN CIREUNGHAS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.968.500,00	KECAMATAN CIREUNGHAS
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.979.000,00	KECAMATAN CIREUNGHAS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.928.000,00	KECAMATAN CIREUNGHAS
126	KECAMATAN CISAAT	3.213.972.206,00	KECAMATAN CISAAT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.178.972.206,00	KECAMATAN CISAAT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	KECAMATAN CISAAT
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000,00	KECAMATAN CISAAT
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00	KECAMATAN CISAAT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN CISAAT
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	KECAMATAN CISAAT
127	KECAMATAN CISOLOK	2.549.600.720,00	KECAMATAN CISOLOK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.509.580.720,00	KECAMATAN CISOLOK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	KECAMATAN CISOLOK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.020.000,00	KECAMATAN CISOLOK

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN CISOLOK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN CISOLOK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	KECAMATAN CISOLOK
128	KECAMATAN CURUGKEMBAR	2.654.517.896,00	KECAMATAN CURUGKEMBAR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.544.356.896,00	KECAMATAN CURUGKEMBAR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.208.000,00	KECAMATAN CURUGKEMBAR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.953.000,00	KECAMATAN CURUGKEMBAR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	KECAMATAN CURUGKEMBAR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	KECAMATAN CURUGKEMBAR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	KECAMATAN CURUGKEMBAR
129	KECAMATAN GEGERBITUNG	2.611.377.919,00	KECAMATAN GEGERBITUNG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.554.553.919,00	KECAMATAN GEGERBITUNG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.620.000,00	KECAMATAN GEGERBITUNG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.760.000,00	KECAMATAN GEGERBITUNG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.148.000,00	KECAMATAN GEGERBITUNG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.148.000,00	KECAMATAN GEGERBITUNG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.148.000,00	KECAMATAN GEGERBITUNG
130	KECAMATAN GUNUNGGURUH	4.196.491.488,00	KECAMATAN GUNUNGGURUH

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.109.895.488,00	KECAMATAN GUNUNGGURUH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.636.000,00	KECAMATAN GUNUNGGURUH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.052.000,00	KECAMATAN GUNUNGGURUH
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.636.000,00	KECAMATAN GUNUNGGURUH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.636.000,00	KECAMATAN GUNUNGGURUH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.636.000,00	KECAMATAN GUNUNGGURUH
131	KECAMATAN JAMPANG KULON	4.200.438.067,00	KECAMATAN JAMPANG KULON
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	KECAMATAN JAMPANG KULON
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	681.380.000,00	KECAMATAN JAMPANG KULON
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN JAMPANG KULON
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN JAMPANG KULON
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	KECAMATAN JAMPANG KULON
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.494.058.067,00	KECAMATAN JAMPANG KULON
132	KECAMATAN JAMPANG TENGAH	2.216.088.556,00	KECAMATAN JAMPANG TENGAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.172.800.556,00	KECAMATAN JAMPANG TENGAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	KECAMATAN JAMPANG TENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.288.000,00	KECAMATAN JAMPANG TENGAH

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00	KECAMATAN JAMPANG TENGAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN JAMPANG TENGAH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	KECAMATAN JAMPANG TENGAH
133	KECAMATAN KABANDUNGAN	3.504.686.150,00	KECAMATAN KABANDUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	645.677.350,00	KECAMATAN KABANDUNGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.600.000,00	KECAMATAN KABANDUNGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.250.000,00	KECAMATAN KABANDUNGAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.910.000,00	KECAMATAN KABANDUNGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.340.000,00	KECAMATAN KABANDUNGAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.070.000,00	KECAMATAN KABANDUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.664.838.800,00	KECAMATAN KABANDUNGAN
134	KECAMATAN KADUDAMPIT	3.250.134.137,00	KECAMATAN KADUDAMPIT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.157.903.137,00	KECAMATAN KADUDAMPIT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.964.000,00	KECAMATAN KADUDAMPIT
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.171.000,00	KECAMATAN KADUDAMPIT
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.947.000,00	KECAMATAN KADUDAMPIT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.952.000,00	KECAMATAN KADUDAMPIT

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.197.000,00	KECAMATAN KADUDAMPIT
135	KECAMATAN KALAPANUNGGAL	2.891.278.905,00	KECAMATAN KALAPANUNGGAL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.998.403.205,00	KECAMATAN KALAPANUNGGAL
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.098.000,00	KECAMATAN KALAPANUNGGAL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.020.000,00	KECAMATAN KALAPANUNGGAL
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.012.000,00	KECAMATAN KALAPANUNGGAL
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.018.000,00	KECAMATAN KALAPANUNGGAL
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.012.000,00	KECAMATAN KALAPANUNGGAL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	684.715.700,00	KECAMATAN KALAPANUNGGAL
136	KECAMATAN KALIBUNDER	2.641.010.455,00	KECAMATAN KALIBUNDER
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.597.010.455,00	KECAMATAN KALIBUNDER
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	KECAMATAN KALIBUNDER
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	KECAMATAN KALIBUNDER
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN KALIBUNDER
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.000.000,00	KECAMATAN KALIBUNDER
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	KECAMATAN KALIBUNDER
137	KECAMATAN KEBONPEDES	2.760.758.052,00	KECAMATAN KEBONPEDES
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.557.215.052,00	KECAMATAN KEBONPEDES

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	64.631.000,00	KECAMATAN KEBONPEDES
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.164.000,00	KECAMATAN KEBONPEDES
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.974.000,00	KECAMATAN KEBONPEDES
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.774.000,00	KECAMATAN KEBONPEDES
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000.000,00	KECAMATAN KEBONPEDES
138	KECAMATAN LENGKONG	2.117.894.656,00	KECAMATAN LENGKONG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.057.994.656,00	KECAMATAN LENGKONG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.300.000,00	KECAMATAN LENGKONG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.400.000,00	KECAMATAN LENGKONG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.300.000,00	KECAMATAN LENGKONG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.300.000,00	KECAMATAN LENGKONG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.600.000,00	KECAMATAN LENGKONG
139	KECAMATAN NAGRAK	2.489.045.602,00	KECAMATAN NAGRAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.423.036.652,00	KECAMATAN NAGRAK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	KECAMATAN NAGRAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	KECAMATAN NAGRAK
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN NAGRAK

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN NAGRAK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	KECAMATAN NAGRAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.008.950,00	KECAMATAN NAGRAK
140	KECAMATAN NYALINDUNG	3.235.349.667,00	KECAMATAN NYALINDUNG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.111.189.667,00	KECAMATAN NYALINDUNG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.880.000,00	KECAMATAN NYALINDUNG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.570.000,00	KECAMATAN NYALINDUNG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.570.000,00	KECAMATAN NYALINDUNG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.570.000,00	KECAMATAN NYALINDUNG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.570.000,00	KECAMATAN NYALINDUNG
141	KECAMATAN PABUARAN	3.265.105.766,00	KECAMATAN PABUARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.120.429.766,00	KECAMATAN PABUARAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.520.000,00	KECAMATAN PABUARAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.422.000,00	KECAMATAN PABUARAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.362.000,00	KECAMATAN PABUARAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.720.000,00	KECAMATAN PABUARAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.652.000,00	KECAMATAN PABUARAN
142	KECAMATAN PARAKANSALAK	3.034.575.550,00	KECAMATAN PARAKANSALAK

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.898.153.650,00	KECAMATAN PARAKANSALAK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.981.800,00	KECAMATAN PARAKANSALAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.000.000,00	KECAMATAN PARAKANSALAK
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.000.000,00	KECAMATAN PARAKANSALAK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.440.000,00	KECAMATAN PARAKANSALAK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.000.100,00	KECAMATAN PARAKANSALAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	KECAMATAN PARAKANSALAK
143	KECAMATAN PARUNGKUDA	2.436.250.173,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.039.191.373,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	129.383.800,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.025.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.620.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.440.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	69.590.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
144	KECAMATAN PALABUHANRATU	4.141.086.892,00	KECAMATAN PALABUHANRATU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.399.221.592,00	KECAMATAN PALABUHANRATU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.600.000,00	KECAMATAN PALABUHANRATU

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	672.185.300,00	KECAMATAN PALABUHANRATU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.080.000,00	KECAMATAN PALABUHANRATU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	KECAMATAN PALABUHANRATU
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	KECAMATAN PALABUHANRATU
145	KECAMATAN PURABAYA	2.293.036.146,00	KECAMATAN PURABAYA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.245.157.146,00	KECAMATAN PURABAYA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.864.000,00	KECAMATAN PURABAYA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.015.000,00	KECAMATAN PURABAYA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN PURABAYA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.000.000,00	KECAMATAN PURABAYA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	KECAMATAN PURABAYA
146	KECAMATAN SAGARANTEN	5.720.857.827,00	KECAMATAN SAGARANTEN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.534.822.827,00	KECAMATAN SAGARANTEN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.200.000,00	KECAMATAN SAGARANTEN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.620.000,00	KECAMATAN SAGARANTEN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.500.000,00	KECAMATAN SAGARANTEN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.335.000,00	KECAMATAN SAGARANTEN

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.380.000,00	KECAMATAN SAGARANTEN
147	KECAMATAN SIMPENAN	2.840.045.781,00	KECAMATAN SIMPENAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.759.557.781,00	KECAMATAN SIMPENAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.097.600,00	KECAMATAN SIMPENAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.097.600,00	KECAMATAN SIMPENAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.097.600,00	KECAMATAN SIMPENAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.097.600,00	KECAMATAN SIMPENAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.097.600,00	KECAMATAN SIMPENAN
148	KECAMATAN SUKABUMI	3.770.000.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.720.374.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.955.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.967.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.971.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.873.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.860.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
149	KECAMATAN SUKARAJA	5.727.756.446,00	KECAMATAN SUKARAJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.114.038.426,00	KECAMATAN SUKARAJA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	168.844.700,00	KECAMATAN SUKARAJA

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	101.951.400,00	KECAMATAN SUKARAJA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101.280.520,00	KECAMATAN SUKARAJA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	107.381.400,00	KECAMATAN SUKARAJA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	134.260.000,00	KECAMATAN SUKARAJA
150	KECAMATAN SURADE	4.343.000.000,00	KECAMATAN SURADE
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.570.990.000,00	KECAMATAN SURADE
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.010.000,00	KECAMATAN SURADE
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	707.000.000,00	KECAMATAN SURADE
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN SURADE
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN SURADE
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.000.000,00	KECAMATAN SURADE
151	KECAMATAN TEGALBULEUD	3.205.667.031,00	KECAMATAN TEGALBULEUD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.120.121.031,00	KECAMATAN TEGALBULEUD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.847.000,00	KECAMATAN TEGALBULEUD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.990.000,00	KECAMATAN TEGALBULEUD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.959.000,00	KECAMATAN TEGALBULEUD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.750.000,00	KECAMATAN TEGALBULEUD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	KECAMATAN TEGALBULEUD
152	KECAMATAN WALURAN	2.307.158.825,00	KECAMATAN WALURAN

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.254.554.825,00	KECAMATAN WALURAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	KECAMATAN WALURAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.804.000,00	KECAMATAN WALURAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.800.000,00	KECAMATAN WALURAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	KECAMATAN WALURAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	KECAMATAN WALURAN
153	KECAMATAN WARUNGKIARA	2.936.824.223,00	KECAMATAN WARUNGKIARA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.822.399.223,00	KECAMATAN WARUNGKIARA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.305.000,00	KECAMATAN WARUNGKIARA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.020.000,00	KECAMATAN WARUNGKIARA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.650.000,00	KECAMATAN WARUNGKIARA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.610.000,00	KECAMATAN WARUNGKIARA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.840.000,00	KECAMATAN WARUNGKIARA
154	KECAMATAN SUKALARANG	3.012.575.766,00	KECAMATAN SUKALARANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.981.045.766,00	KECAMATAN SUKALARANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.142.000,00	KECAMATAN SUKALARANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.172.000,00	KECAMATAN SUKALARANG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.072.000,00	KECAMATAN SUKALARANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.072.000,00	KECAMATAN SUKALARANG

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.072.000,00	KECAMATAN SUKALARANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	KECAMATAN SUKALARANG
155	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	108.917.463.352,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.824.430.852,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.006.579.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	87.679.182.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.613.662.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.344.086.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.449.522.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	TOTAL	4.575.673.537.229	SEMUA PD

Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sumber pendanaannya berasal dari kolaborasi antara pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), Dana Umat, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan daerah memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan yang berasal dari APBN terdiri atas: (1) Dana perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta dana transfer khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik. (2) Dana Insentif Daerah (DID), dan (3) Dana Desa.

1) Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus. Dana transfer umum merupakan transfer dengan pemanfaatan dana yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah memiliki kebebasan untuk menggunakan DTU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Dana transfer umum terbagi menjadi dana bagi hasil dan dana alokasi umum, yaitu:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah. DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak negara dan bukan pajak tahun berjalan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(c) Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dana transfer khusus dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan Nonfisik.

(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah.

(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dana alokasi khusus non fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK nonfisik dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan wabah covid-19 pada aspek medis, pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN ke daerah dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

3) Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP)

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah pendapatan daerah yang belum mampu sepenuhnya membiayai pembangunan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan KPBU dapat menjadi solusi dengan menerapkan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan.

3. Dana Umat

Salah satu potensi sumber pendanaan lainnya yaitu dana masyarakat/umat. Dari berbagai jenis dana umat yang berpotensi yaitu zakat dan wakaf uang, untuk itu perlu adanya komitmen dan kerja sama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, dan badan zakat, serta masyarakat Kabupaten Sukabumi secara umum untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Sumber pendanaan pembangunan lainnya yaitu dari dana CSR atau dana tanggungjawab sosial perusahaan. Kolaborasi stakeholder menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam implimentasi CSR yang mampu memberdayakan masyarakat yaitu dalam bentuk keterlibatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program-program CSR. Peran pemerintah akan menjadi sangat penting, sebab sebagai pemegang otoritas regulasi memiliki kontrol terhadap aktivitas dalam masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat. Dengan kekuasaan, legitimasi pemerintah dapat mempengaruhi dan mengarahkan program CSR agar sejalan dengan orientasi pembangunan daerah.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN

3.1. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis daerah atau indikator kinerja utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja perangkat daerah.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Daerah/Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2021-2026. IKU pemerintah dicapai dengan dukungan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD), baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD) yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD) lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian 26 IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi pada Triwulan IV Tahun 2024, 11 IKU melampaui target (42,31 persen), 1 IKU tercapai sesuai target (3,85 persen), 8 IKU tidak tercapai (30,77 persen) dan 6 IKU belum tersedia datanya sampai dengan laporan ini disusun (23,08 persen). Lebih rinci mengenai target, realisasi dan tingkat capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi pada Triwulan IV Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sukabumi pada Triwulan IV Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Triwulan IV Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	76,00	78,01	102,64	IKU Pemerintah Daerah
2	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	71,63	72,06	100,60	IKU Pemerintah Daerah
3	Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	82,00	66,58	118,80	IKU Pemerintah Daerah
4	Angka kematian bayi	Per 1000 KH	4,15	5,37	70,60	IKU Pemerintah Daerah
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,92	n/a	n/a	IKU Pemerintah Daerah
6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,55	7,34	97,22	IKU Pemerintah Daerah
7	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,47	12,39	99,36	IKU Pemerintah Daerah

No.	Indikator	Satuan	Triwulan IV Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
8	Tingkat Kemiskinan	%	6,60	6,87	95,91	IKU Pemerintah Daerah
9	Persentase pemajuan kebudayaan	%	22,61	24,38	107,83	IKU Pemerintah Daerah
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,5 -10,5	7,11	116,35	IKU Pemerintah Daerah
11	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kelautan dan Perikanan	%	3,13	n/a	n/a	IKU Pemerintah Daerah
12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	86,10	90,44	105,04	IKU Pemerintah Daerah
13	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	1 - 2	n/a	n/a	IKU Pemerintah Daerah
14	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	%	3,5	n/a	n/a	IKU Pemerintah Daerah
15	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	%	2,50	3,01	120,40	IKU Pemerintah Daerah
16	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	68,11	65,15	95,65	IKU Pemerintah Daerah
17	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	%	88,08	n/a	n/a	IKU Pemerintah Daerah
18	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	%	71,53	60,57	84,68	IKU Pemerintah Daerah
19	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	54,80	54,37	99,22	IKU Pemerintah Daerah
20	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	%	26,17	48,51	185,36	IKU Pemerintah Daerah
21	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	60	60	100,00	IKU Pemerintah Daerah
22	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	87,50	90,3	100,89	IKU Pemerintah Daerah
23	Indeks profesionalitas ASN	Poin	71,40	78,54	110,00	IKU Pemerintah Daerah
24	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Opini	WTP	n/a	n/a	IKU Pemerintah Daerah
25	Nilai akuntabilitas kinerja daerah	Poin	72,00	66,84	92,83	IKU Pemerintah Daerah
26	Indeks inovasi daerah	Poin (Predikat)	59,00	64,82 (Sangat Inovatif)	109,86	IKU Pemerintah Daerah

Keterangan:

	Melampaui
	Tercapai
	Tidak Tercapai
	Tidak Tersedia data

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah (IKPD)

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Sukabumi tidak hanya diindikasikan oleh IKU pemerintah daerah, namun sangat ditentukan oleh pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan

fungsi. Indikator kinerja perangkat daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi bahwa IKPD yang menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2024, dari 55 IKPD, terdapat 12 IKPD yang melampaui target(21,82 persen), 7 IKPD tercapai sesuai target(12,73 persen), 17 IKPD tidak tercapai (30,91 persen) dan 19 IKPD yang tidak tersedia data sampai dengan laporan ini disusun (34,55 persen). Secara rinci target, realisasi dan tingkat capaian masing-masing IKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Triwulan IV Tahun 2024


No.	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2024			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman						
		1 Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Persentase PSU permukiman dalam kondisi baik	Persen	60	60	100,00
		2 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Bangunan	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	Persen	55	50	90,91
		3 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar	Persen	1	0,55	55,00
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang						
		1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Inventarisasi P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)	Presentase Progres IP4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)	persen	100	n/a	n/a
		2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	persen	85,8	n/a	n/a
3	Dinas Pekerjaan Umum						
		1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten	Persen	71,53	60,57	84,68
			Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persen	54,8	54,37	99,22
4	Dinas Lingkungan Hidup						
		1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	66,11	65,15	98,55
5	Dinas Perhubungan						
		1 Meningkatnya Kinerja Layanan transportasi	Rasio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio	0,23	0,23	100,00
			Ratio Pelayanan Lalu Lintas Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP)	Rasio	0,75	0,75	100,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
			Meningkatnya laju investasi daerah	Laju investasi daerah	Persen	3,5	-37,62
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
			Meningkatnya Skala Pelaku Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	Persen	2,5	3,01
8	Dinas Pariwisata						

No.	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	3	-51,40	-1713,33
9	Dinas Perikanan					
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase	2	n/a	n/a
10	Dinas Pertanian					
	Meningkatnya produksi pertanian	Meningkatnya produksi pertanian	Persen	2	n/a	n/a
11	Dinas Ketahanan Pangan					
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	94,8	92,69	97,77
12	Dinas Peternakan					
	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	2	n/a	n/a
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian					
	1 Meningkatkan Skala Usaha Pelaku Ekonomi	Presentase IKM Mandiri	Persen	9,81	9,81	100,00
	2 Meningkatkan Layanan Pemanfaatan Panas Bumi Daerah	Persentase Layanan Pemanfaatan Panas Bumi	Persen	100	100	100,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	87,5	85,40	97,60
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	Meningkatnya pengelolaan penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana	Persen	100	100	100,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	1 Meningkatkan Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	71	78,54	110,62
	2 Meningkatkan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	Persentase Pegawai Negeri Sipil yang ditingkatkan kompetensinya	Persen		n/a	n/a
17	Badan Pendapatan Daerah					
	Meningkatnya Pajak daerah dan Retribusi daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Persen	4,73	5,51	116,49
18	Inspektorat					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	6,4	16,35	255,47
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian					
	1 Meningkatkan Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	Persen	70	n/a	n/a
	2 Meningkatkan Nilai Area Keamanan Informasi	Persentase Nilai Area Keamanan Informasi	Persen	73	n/a	n/a
	3 Meningkatkan mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	Persen	66	n/a	n/a
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	opini	WTP	n/a	n/a
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
	1 Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan	Persentase PD yang menerapkan kearsipan secara baku	Persen	70	n/a	n/a

No.	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	2 Terwujudnya Pembudayaan Gemar Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	60	n/a	n/a
22	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
	1 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Poin	23,5	n/a	n/a
	2 Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Persentase	62,5	n/a	n/a
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	1 Meningkatkan Pemahaman dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks	82,5	85,7	103,88
	2 Meningkatkan Pemahaman Peran dan Fungsi Ormas dalam Pembangunan di Daerah	Indeks Profesionalisme Ormas	Indeks	71,5	73	102,10
	3 Mediasi Fasilitasi Konflik dan Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebhinekaan Guna Mewujudkan Kerukunan Masyarakat di Daerah	Indeks ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks	70,5	71,31	101,15
	4 Menurunkan Angka Gangguan Sosial di Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	Persen	25	27,78	111,12
	5 Meningkatkan Pemahaman Politik Pelajar Pemilih Pemula dan Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	77	72	93,51
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas layanan publik	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten	Persen	95	60,98	64,19
25	Satuan Polisi Pamong Praja					
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	70	50	71,43
26	Dinas Sosial					
	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,6	n/a	n/a
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Indeks Developmen Gender (IDG)	Nilai	57,37	n/a	n/a
		Kabupaten Layak anak (KLA)	Nilai	940	940,11	100,01
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Meningkatnya Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	Desa	79	157	198,73
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
	1 Meningkatkan Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	55-70	n/a	n/a
	2 Meningkatkan jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah transmigran yang terlatih	Persen	20,4	n/a	n/a
30	Sekretariat Daerah					
	1 Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian Indikator bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	96,91	96,91

No.	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya efektivitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian Indikator bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persen	100	92,47	92,47
3	Meningkatnya efektivitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan daerah bidang Administrasi Umum	Nilai Komponen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen	100	98,37	98,37
31	Dinas Pendidikan					
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan	Rata-rata APK PAUD (3-6 tahun), SD, SMP, dan Kesetaraan	persen	85,42	n/a	n/a
32	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Rata-rata Jumlah Kelahiran/Total Fertility Rate (TFR)	persentase	2,26	n/a	n/a
33	Dinas Kesehatan					
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,63	n/a	n/a
34	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
	Meningkatnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	Persen	78	75,17	96,37
35	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga					
1	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	22,61	24,38	107,83
2	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Persen	68,6	68,6	100,00

Keterangan:

	Melampaui
	Tercapai
	Tidak Tercapai
	Tidak Tersedia data

Tabel 3.3. Jumlah dan Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Kriteria Pencapaian Pada Triwulan IV Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah IKPD	Melampaui		Tercapai		Tidak Tercapai		Data tidak tersedia	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3,00	0,00	0,00	1,00	33,33	2,00	66,67	0,00	0,00
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pariwisata	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
10	Dinas Pertanian	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
12	Dinas Peternakan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
17	Badan Pendapatan Daerah	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inspektorat	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00

No.	Perangkat Daerah	Jumlah IKPD	Melampaui		Tercapai		Tidak Tercapai		Data tidak tersedia	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,00	4,00	80,00	0,00	0,00	1,00	20,00	0,00	0,00
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
26	Dinas Sosial	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
30	Sekretariat Daerah	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,00	0,00
31	Dinas Pendidikan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
32	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
33	Dinas Kesehatan	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
35	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TOTAL		55,00	12,00	21,82	7,00	12,73	17,00	30,91	19,00	34,55

3.2. Capaian Kinerja Tematik

3.2.1. Capaian Kinerja Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang menyangkut masalah pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan Keputusan Bupati Sukabumi nomor: 460/Kep.102-Bappelitbangda/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi. Tim tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan pemetaan Program dan kegiatan yang menunjang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, dimana pemetaan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) tujuan program, yaitu Meningkatkan Pendapatan, Menurunkan Beban Pengeluaran dan Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Adapun anggaran dan realisasi khusus untuk bidang yang terkait dengan kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

No.	Tujuan Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase serapan Anggaran (%)
1	Meningkatkan Pendapatan	30413090420	28863604125	94,91
2	Menurunkan Beban Pengeluaran	599.439.595.291	595.665.660.290	99,37
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	215.590.948.124	201.936.559.990	93,67
	JUMLAH	845.443.633.835	826.465.824.405	97,76

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pagu anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 sebesar Rp. 845.443.633.835,- (Delapan ratus empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah). Adapun sampai dengan triwulan IV tahun 2024 realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 826.465.824.405,- (Delapan ratus dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima Rupiah) atau terserap sebesar 97,76 persen. Adapun alokasi dan realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan berdasarkan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Alokasi dan realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan berdasarkan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2024

No.	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pendapatan		30.413.090.420	28.863.604.125	94,91
		Dinas Sosial	1.160.099.000	1.156.652.000	99,70
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.682.676.200	2.673.322.629	99,65
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.000.000	39.920.000	99,80
		Dinas Ketahanan Pangan	135.000.000	131.238.000	97,21
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90.000.000	89.690.000	99,66
		Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	40.000.000	39.985.000	99,96
		Dinas Arsip dan Perpustakaan	225.000.000	221.751.638	98,56
		Dinas Perikanan	6.862.399.220	6.137.397.780	89,44
		Dinas Pertanian	16.537.491.000	16.230.659.078	98,14
		Dinas Peternakan	2.640.425.000	2.142.988.000	81,16
		2	Menurunkan Beban Pengeluaran		599.439.595.291
Dinas Pendidikan	386.260.809.800			383.575.669.050	99,30
Dinas Kesehatan	204.046.455.591			202.920.658.582	99,45
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.453.069.500			2.326.921.800	94,86
Dinas Sosial	5.225.586.800			5.393.207.700	103,21
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.437.000			28.037.000	98,59
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96.529.600			95.675.000	99,11
Dinas Ketahanan Pangan	890.000.000			889.795.250	99,98
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	438.707.000			435.695.908	99,31
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan				215.976.622.124
		Dinas Pendidikan	25.269.617.400	25.161.392.870	99,57
		Dinas Pekerjaan Umum	18.600.419.800	18.190.904.057	97,80
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	69.309.374.883	64.446.809.738	92,98
		Dinas Ketahanan Pangan	144.427.000	124.356.800	86,10
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	881.999.800	881.720.800	99,97
		Dinas Perhubungan	284.987.000	283.195.000	99,37
		Dinas Perikanan	94.111.000	93.944.000	99,82
		Dinas Pertanian	101.344.970.241	93.090.995.841	91,86
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46.715.000	46.150.884	98,79
JUMLAH TOTAL			845.829.307.835	826.848.734.405	97,76

3.2.2. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa perhitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Dan untuk indeks pencapaian SPM dikelompokkan menjadi beberapa kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut:

Tabel 3.6. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70-79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	<60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Kategori nilai indeks pencapaian SPM Kabupaten Sukabumi pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

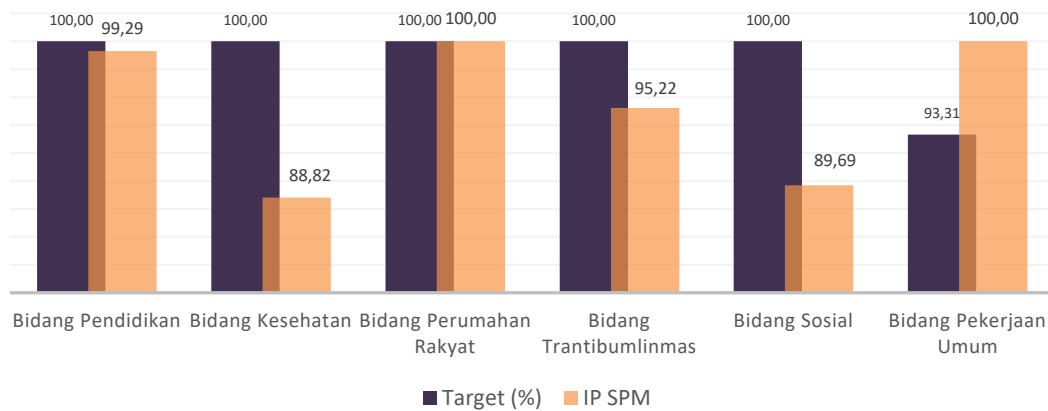
- 1) Kategori Tuntas Paripurna: Bidang Perumahan Rakyat (100 persen) dan Bidang Pekerjaan Umum (100 persen)
- 2) Kategori Tuntas Utama: Bidang Pendidikan (99,29 persen), dan Bidang Trantibumlinmas (95,22 persen)
- 3) Kategori Tuntas Madya: Bidang Kesehatan (88,82 persen) dan Bidang Sosial (89,69 persen)
- 4) Kategori Tuntas Pratama: -
- 5) Kategori Tuntas Muda: -
- 6) Kategori Belum Tuntas: -

Secara umum, pemenuhan SPM Kabupaten Sukabumi berdasarkan bidang pada triwulan IV tahun 2024 belum tercapai sesuai target, seperti yang ditunjukkan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.5. Capaian SPM Kabupaten Sukabumi Triwulan IV Tahun 2024

No	SPM	Target (%)	IP SPM	%
1	Bidang Pendidikan	100,00	99,29	99,29
2	Bidang Kesehatan	100,00	88,82	88,82
3	Bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00	100,00
4	Bidang Trantibumlinmas	100,00	95,22	95,22
5	Bidang Sosial	100,00	89,69	89,69
6	Bidang Pekerjaan Umum	93,31	100,00	107,17

Sumber: e-SPM



Gambar 3.1. Realisasi SPM Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

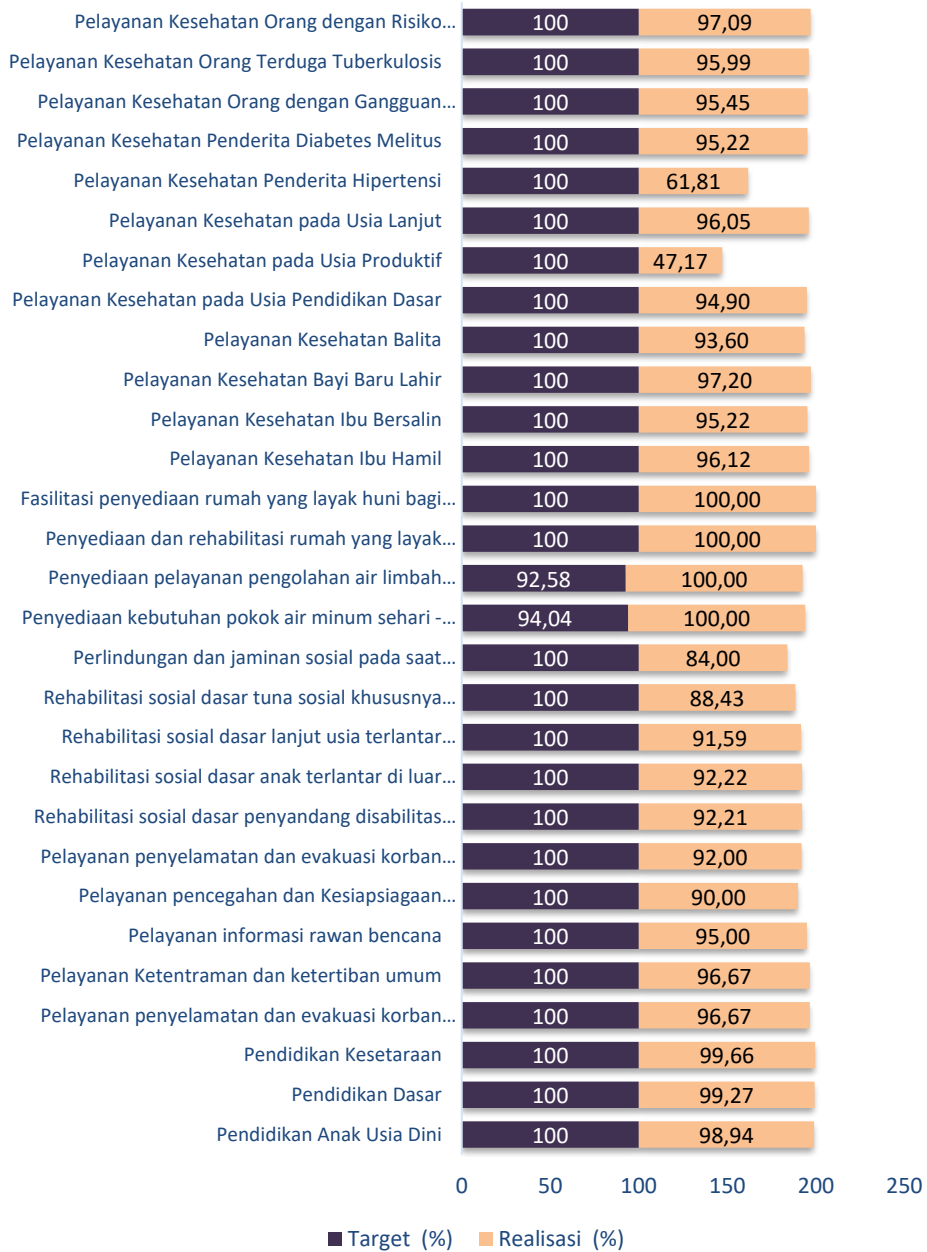
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hasil evaluasi berdasarkan capaian Jenis pelayanan SPM di Kabupaten Sukabumi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, terdapat 25 jenis pelayanan yang belum mencapai target atau sebesar 82,61 persen, terdiri dari: (1) Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Pendidikan Dasar; (3) Pendidikan Kesetaraan; (4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; (5) Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum; (6) Pelayanan informasi rawan bencana; (7) Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana; (8) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (9) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (10) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (11) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti; (12) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; (13) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota (14) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; (15) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; (16) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; (17) Pelayanan Kesehatan Balita; (18) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; (19) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; (20) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; (21) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; (22) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; (23) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; (24) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; (25) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Dan jenis pelayanan SPM yang tercapai sesuai target ada 2 atau sebesar 6,90 persen, terdiri dari Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota, serta Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota. Sedangkan untuk jenis pelayanan SPM yang melampaui target RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 adalah Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Adapun rinciannya seperti yang tertera dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.6. Capaian Jenis Pelayanan SPM Kabupaten Sukabumi Pada Triwulan IV Tahun 2024

Bidang Urusan	No	Jenis Pelayanan SPM	2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	98,94	98,94
	2	Pendidikan Dasar	100	99,27	99,27
	3	Pendidikan Kesetaraan	100	99,66	99,66
Trantibumlin mas	4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	96,67	96,67
	5	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100	96,67	96,67
	6	Pelayanan informasi rawan bencana	100	95,00	95,00
	7	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	90,00	90,00
	8	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	92,00	92,00
Sosial	9	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	92,21	92,21
	10	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	92,22	92,22
	11	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100	91,59	91,59
	12	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	88,43	88,43
	13	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100	84,00	84,00
Pekerjaan Umum	14	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	94,04	100,00	106,34
	15	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	92,58	100,00	108,01
Perumahan Rakyat	16	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	100	100,00	100,00
	17	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	100	100,00	100,00
Kesehatan	18	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	96,12	96,12
	19	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	95,22	95,22
	20	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	97,20	97,20
	21	Pelayanan Kesehatan Balita	100	93,60	93,60
	22	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	94,90	94,90
	23	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	47,17	47,17
	24	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	96,05	96,05
	25	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	61,81	61,81
	26	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	95,22	95,22
	27	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	95,45	95,45
	28	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	95,99	95,99
	29	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	97,09	97,09

Keterangan:

	Melampaui
	Tercapai
	Tidak Tercapai
	Tidak Tersedia data



Gambar 3.2. Capaian Per Jenis Pelayanan SPM Kabupaten Sukabumi Triwulan IV Tahun 2024

3.4. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah dibahas di atas, sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja program. Indikator kinerja program juga menjadi indikator kinerja kunci tingkat hasil (*Outcome*) sebagaimana dimuat pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 9 perangkat daerah (25 persen) memiliki rata-rata tingkat capaian kinerja program >100 persen, 3 perangkat daerah (8,33 persen) memiliki rata-rata tingkat capaian kinerja program 100 persen, 10 Perangkat daerah (27,78 persen) memiliki rata-rata tingkat capaian kinerja program dibawah 100 persen, sedangkan 14 perangkat daerah belum menyampaikan data capaian kinerja programnya sampai dengan laporan ini disusun. Adapun perangkat daerah dengan rata-rata tingkat capaian kinerja tertinggi, yaitu: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Bapenda, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sementara perangkat daerah dengan rata-rata tingkat capaian kinerja terendah, yaitu: Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Ditinjau dari sisi capaian anggaran, perangkat daerah yang memiliki rata-rata tingkat capaian anggaran yang melebihi target anggaran RKPD (lebih dari 100 persen) yaitu: Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dinas Arsip Dan Perpustakaan, Inspektorat, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Sekretariat DPRD, dan Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk perangkat daerah yang memiliki rata-rata tingkat capaian anggaran rendah terdiri dari: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Dinas Lingkungan Hidup.

Rincian capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Capaian Indikator Program Kabupaten Sukabumi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	DINAS PENDIDIKAN					1.391.988.443.352		1.330.525.792.966	N/A	95,58	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.391.988.443.352		1.330.525.792.966	N/A	95,58	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK Sekolah Dasar	%	101,82	103,20	278.957.791.350	N/A	267.208.644.931	N/A	95,79	Disdik
		Persentase APK Sekolah Menengah Pertama	%	99,43	100,63	197.289.799.800	N/A	163.286.654.788	N/A	82,76	Disdik
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	51,54	52,74	67.645.907.000	N/A	13.767.626.700	N/A	20,35	Disdik
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	84,10	85,30	23.644.964.000	N/A	22.878.367.600	N/A	96,76	Disdik
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	0,96	57,76	1.580.000.000	N/A	1.427.012.000	N/A	90,32	Disdik
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan PTKnya	%	50,90	51,05	34.447.182.200	N/A	32.486.715.400	N/A	94,31	Disdik
01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang belum memiliki izin operasional menjadi memiliki izin operasional	%	73,14	75,24	168.000.000	N/A	87.200.000	N/A	51,90	Disdik
01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASRA	Rata-rata nilai peserta didik pada mata pelajaran bahasa sunda	%	7,02	7,41	449.986.600	N/A	311.208.600	N/A	69,16	Disdik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	356.276.000	100,00	215.276.000	100,00	60,42	Disdik
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	778.605.407.482	100,00	820.746.204.127	100,00	105,41	Disdik
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	1.644.126.470	100,00	1.551.933.385	100,00	94,39	Disdik
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	1.191.725.050	100,00	1.321.965.800	100,00	110,93	Disdik
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	4.031.200.800	100,00	3.619.545.135	100,00	89,79	Disdik
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	200.000.000	100,00	71.880.000	100,00	35,94	Disdik
		Persentase ASN yang memiliki	%	100,00	100,00	1.070.167.800	100,00	860.237.500	100,00	80,38	Disdik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		kesesuaian kompetensi									
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	705.908.800	100,00	685.321.000	100,00	97,08	Disdik
	DINAS KESEHATAN					1.025.648.551.394		904.474.295.119	N/A	88,19	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.025.648.551.394		904.474.295.119	N/A	88,19	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	60,00	66,00	83.262.313.528	N/A	57.817.950.323	N/A	69,44	Dinkes
		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	15,00	18,00	286.729.158.152	N/A	251.727.426.666	N/A	87,79	Dinkes
		Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin	%	100,00	100,00	331.692.750	N/A	331.692.750	N/A	100,00	Dinkes
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	35,00	41,00	31.697.895.440	N/A	28.512.739.245	N/A	89,95	Dinkes
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan	%	100,00	100,00	259.919.000	N/A	259.417.000	N/A	99,81	Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		dan Makanan Minuman yang berizin									
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	28,00	37,00	3.557.402.800	N/A	3.117.061.800	N/A	87,62	Dinkes
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	356.929.301	100,00	305.804.300	100,00	85,68	Dinkes
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	154.542.858.540	100,00	133.639.953.587	100,00	86,47	Dinkes
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	8.448.967.285	100,00	8.096.304.926	100,00	95,83	Dinkes
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	1.399.440.231	100,00	819.276.506	100,00	58,54	Dinkes
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.225.000.000	100,00	98.950.000	100,00	8,08	Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	1.720.497.400	100,00	1.704.622.560	100,00	99,08	Dinkes
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	535.294.434	100,00	357.664.500	100,00	66,82	Dinkes
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	18.147.000	100,00	16.654.000	100,00	91,77	Dinkes
		Persentase BLUD yang meningkat pelayanannya				451.563.035.533	N/A	417.668.776.956	N/A	92,49	Dinkes
	DINAS PEKERJAAN UMUM					224.521.811.771		204.251.273.551	98,39	90,97	
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					224.521.811.771		204.251.273.551	98,39	90,97	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	59,28	54,80	40.743.408.800	54,37	30.471.275.251	99,22	74,79	DPU
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	%	71,42	71,42	143.131.425.457	60,57	135.153.577.000	84,81	94,43	DPU
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Pengelolaan	%	100,00	100,00	810.850.000	98,25	491.255.000	98,25	60,59	DPU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	450.071.700	100,00	347.754.300	100,00	77,27	DPU
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	24.088.440.154	100,00	23.024.008.607	100,00	95,58	DPU
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	2.610.666.000	100,00	2.185.068.021	100,00	83,70	DPU
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	1.254.754.760	100,00	963.398.431	100,00	76,78	DPU
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	9.264.491.600	100,00	9.187.581.141	100,00	99,17	DPU
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	928.950.000	100,00	846.642.800	100,00	91,14	DPU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	1.208.640.000	100,00	1.550.721.000	100,00	128,30	DPU
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	30.113.300	100,00	29.992.000	100,00	99,60	DPU
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					264.842.659.192		133.699.706.400	89,03	50,48	
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					213.264.448.455		133.699.706.400	80,26	62,69	
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	85,08	88,78	26.711.903.988	87,03	21.850.221.200	98,03	81,80	Disperkim
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	79,76	82,33	6.537.636.800	79,97	6.655.574.500	97,13	101,80	Disperkim
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	%	32,50	47,12	1.956.437.000	32,85	1.624.562.000	69,72	83,04	Disperkim
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang memiliki PSU kualitas baik	%	8,00	60,00				0,00	#DIV/0!	Disperkim
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang kondisi baik	Unit	27,00	12,00	83.233.900.250	14,00	6.342.928.400	116,67	7,62	Disperkim

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Unit	2,00	4,00	94.824.570.417	4,00	97.226.420.300	100,00	102,53	Disperkim
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					51.578.210.737		48.956.224.268	97,80	94,92	Disperkim
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tidak layak huni akibat bencana dan relokasi pembangunan yang tertangani.	%	100,00	100,00	2.016.240.000	100,00	1.970.479.000	100,00	97,73	Disperkim
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata	%	8,81	26,17	18.943.557.891	48,51	18.633.855.650	185,36	98,37	Disperkim
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	91,88	94,21	10.000.000.000	92,25	10.074.438.000	97,92	100,74	Disperkim
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah kawasan perumahan yang memiliki PSU kualitas baik	unit	12,00	15,00	6.581.092.778	14,00	5.619.926.638	93,33	85,40	Disperkim
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	160.728.500	100,00	153.456.100	100,00	95,48	Disperkim

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	7.401.995.368	100,00	6.944.027.075	100,00	93,81	Disperkim
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	1.071.577.000	100,00	973.218.228	100,00	90,82	Disperkim
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	404.433.400	97,00	374.583.405	97,00	92,62	Disperkim
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	4.458.532.400	100,00	3.882.060.172	100,00	87,07	Disperkim
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-		-	0,00	#DIV/0!	Disperkim
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	519.425.000	100,00	310.022.000	100,00	59,69	Disperkim
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan	%	100,00	100,00	20.628.400	100,00	20.158.000	100,00	97,72	Disperkim

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perundang-undangan									
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					11.801.471.570		11.359.874.710	95,76	96,26	
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.801.471.570		11.359.874.710	95,76	96,26	
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95,00	95,00	1.143.395.800	95,00	950.165.000	100,00	83,10	Satpol PP
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50,00	70,00	721.226.700	70,00	610.921.400	100,00	84,71	Satpol PP
		Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	%	30,00	50,00	48.059.000	26,66	62.269.000	53,32	129,57	Satpol PP
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	29.330.800	100,00	43.483.200	100,00	148,25	Satpol PP
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	6.147.708.590	100,00	5.836.925.283	100,00	94,94	Satpol PP
		Persentase sarana dan prasarana	%	100,00	100,00	767.581.480	100,00	694.229.401	100,00	90,44	Satpol PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		kantor dalam kondisi baik									
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	243.338.800	100,00	326.769.600	100,00	134,29	Satpol PP
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	59.927.800	100,00	2.358.027.626	100,00	3934,78	Satpol PP
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	2.445.555.600	100,00	188.788.000	100,00	7,72	Satpol PP
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	176.377.000	100,00	269.426.200	100,00	152,76	Satpol PP
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	18.970.000	100,00	18.870.000	100,00	99,47	Satpol PP
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					11.607.901.998		9.391.744.785	98,48	80,91	
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.607.901.998	907,81	9.391.744.785	98,48	80,91	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	1,00	1,00	498.000.000	1,57	164.951.100	157,00	33,12	BPBD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5,00	5,00	1.073.069.500	6,24	1.072.475.700	124,80	99,94	BPBD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	3.150.000.000	100,00	2.204.107.650	100,00	69,97	BPBD
		Persentase capaian upaya pendukung terhadap Penataan Sistem dasar penanggulangan Bencana	%	NA	100,00	450.000.000	100,00	115.000.000	100,00	25,56	BPBD
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	57.907.550	100,00	55.771.800	100,00	96,31	BPBD
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	3.793.039.648	100,00	3.519.848.202	100,00	92,80	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	640.890.000	100,00	441.500.600	100,00	68,89	BPBD
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	146.296.500	100,00	156.375.420	100,00	106,89	BPBD
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.633.132.800	100,00	1.589.658.013	100,00	97,34	BPBD
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	125.000.000	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	15.000.000	100,00	52.065.500	100,00	347,10	BPBD
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	25.566.000	100,00	19.990.800	100,00	78,19	BPBD
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					20.708.620.536		19.780.045.585	178,10	95,52	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					20.708.620.536	763,85	19.780.045.585	178,10	95,52	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan WMK	Menit	15,00	13,00	3.153.195.000	11,00	3.025.939.000	84,62	95,96	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100,00	100,00	751.785.997	100,00	739.019.587	100,00	98,30	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran	%	3,97	4,50	144.967.000	52,85	169.422.000	1174,44	116,87	Dinas Damkar dan Penyelamatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	24.332.800	100,00	16.558.000	100,00	68,05	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	10.924.026.443	100,00	10.368.804.263	100,00	94,92	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	685.608.000	100,00	649.731.907	100,00	94,77	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	838.466.096	100,00	855.257.940	100,00	102,00	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan	%	100,00	100,00	4.140.739.700	100,00	3.910.536.488	100,00	94,44	Dinas Damkar dan Penyelamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		kebutuhan perkantoran									
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-			0,00	#DIV/0!	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	45.499.500	100,00	44.776.400	100,00	98,41	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-			0,00	#DIV/0!	Dinas Damkar dan Penyelamatan
	DINAS SOSIAL					19.108.124.612		12.359.394.062	83,26	64,68	
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					19.108.124.612		12.359.394.062	83,26	64,68	
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	8,67	18,91	2.023.799.000	9,92	1.254.575.150	52,46	61,99	Dinsos
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	21,63	15,67	5.425.000	1,57	1.658.000	10,02	30,56	Dinsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS/PMKS yang tertangani dan berfungsi sosial di luar panti.	%	8,55	18,29	4.052.473.057	14,55	2.421.884.000	79,55	59,76	Dinsos
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	17,30	16,54	5.379.000.000	15,89	1.946.455.000	96,07	36,19	Dinsos
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	100,00	100,00	580.452.800	100,00	372.027.700	100,00	64,09	Dinsos
		Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	%	16,55	16,68	299.000.000	1,79	294.975.800	10,73	98,65	Dinsos
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman makam Pahlawan yang dikelola	%	100,00	100,00	93.106.440	100,00	8.161.000	100,00	8,77	Dinsos
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	29.000.000	100,00	28.737.000	100,00	99,09	Dinsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	4.227.510.715	100,00	3.913.226.609	100,00	92,57	Dinsos
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	693.520.000	100,00	616.055.100	100,00	88,83	Dinsos
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	426.494.000	100,00	370.097.400	100,00	86,78	Dinsos
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.039.093.600	100,00	970.121.403	100,00	93,36	Dinsos
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100.000.000	100,00	-	100,00	0,00	Dinsos
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	149.250.000	100,00	151.810.900	100,00	101,72	Dinsos
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan	%	100,00	100,00	10.000.000	100,00	9.609.000	100,00	96,09	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perundang-undangan									
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					15.187.022.051		13.380.254.148	85,81	88,10	
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					14.985.238.051	988,03	13.253.761.264	85,81	88,45	
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90,00	96,00	50.000.000	71,43	48.260.000	74,41	96,52	Disnakertrans
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,10	2,70	2.843.186.600		2.555.356.000	0,00	89,88	Disnakertrans
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	27,00	30,00	584.153.000	16,60	389.035.629	55,33	66,60	Disnakertrans
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100,00	100,00	194.871.050	100,00	179.117.500	100,00	91,92	Disnakertrans

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	109.642.500	100,00	83.961.721	100,00	76,58	Disnakertrans
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	8.054.296.941	100,00	7.494.565.586	100,00	93,05	Disnakertrans
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	72.879.000	100,00	75.232.000	100,00	103,23	Disnakertrans
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	528.756.560	100,00	481.855.334	100,00	91,13	Disnakertrans
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	120.000.000	100,00	43.800.000	100,00	36,50	Disnakertrans
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	1.514.622.400	100,00	1.231.209.853	100,00	81,29	Disnakertrans
		Persentase ASN yang memiliki	%	100,00	100,00	23.000.000	100,00	24.638.000	100,00	107,12	Disnakertrans

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		kesesuaian kompetensi									
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	889.830.000	100,00	646.729.641	100,00	72,68	Disnakertrans
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					201.784.000		126.492.884	N/A	62,69	Disnakertrans
03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20,00	20,00	161.414.000	N/A	86.852.884	N/A	53,81	Disnakertrans
03.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	16,60	20,40	40.370.000	N/A	39.640.000	N/A	98,19	Disnakertrans
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.730.786.448		10.212.953.640	86,31	95,17	
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.730.786.448	1079,12	10.212.953.640	86,31	95,17	
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE)	Nilai	80,00	90,00	220.000.000	90,00	215.419.000	100,00	97,92	DP3A
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,00	0,00	349.677.000	0,01	348.267.550	-6,25	99,60	DP3A
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka	%	97,99	89,09	3.247.500.000	89,09	3.083.356.400	100,00	94,95	DP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		peningkatan kualitas keluarga									
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat akurasi data gender dan anak	%	100,00	100,00	90.000.000	100,00	89.640.000	100,00	99,60	DP3A
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	12,17	100,00	230.529.600	100,00	264.916.000	100,00	114,92	DP3A
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,02	0,02	460.163.000	0,02	457.368.500	114,57	99,39	DP3A
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	128.141.000	100,00	129.790.000	100,00	101,29	DP3A
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	4.496.005.348	100,00	4.285.533.198	100,00	95,32	DP3A
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	484.040.000	100,00	442.390.500	100,00	91,40	DP3A
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	271.500.000	100,00	290.855.400	100,00	107,13	DP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	629.149.000	100,00	478.844.942	100,00	76,11	DP3A
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-	0,00	-	0,00	0,00	DP3A
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	114.081.500	100,00	116.577.150	100,00	102,19	DP3A
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	10.000.000	100,00	9.995.000	100,00	99,95	DP3A
	DINAS KETAHANAN PANGAN					8.333.538.784		8.011.930.299	100,00	96,14	
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.333.538.784	965,35	8.011.930.299	100,00	96,14	
02.09.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	%	14,29	10,00	185.000.000	10,00	166.099.600	100,00	89,78	DKP
02.09.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%	23,37	38,24	1.034.412.000	38,24	1.190.594.450	100,00	115,10	DKP
02.09.0 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa	%	14,47	17,11	145.427.000	17,11	85.357.000	100,00	58,69	DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Rentan Rawan Pangan									
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	100,00	100,00	305.060.000	100,00	231.512.000	100,00	75,89	DKP
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	166.316.000	100,00	146.629.000	100,00	88,16	DKP
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	4.451.733.619	100,00	4.292.391.809	100,00	96,42	DKP
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	605.853.200	100,00	553.919.619	100,00	91,43	DKP
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	533.001.985	100,00	435.939.700	100,00	81,79	DKP
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	816.168.400	100,00	802.870.121	100,00	98,37	DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	#DIV/0!	DKP
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	53.475.580	100,00	69.834.000	100,00	130,59	DKP
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	37.091.000	100,00	36.783.000	100,00	99,17	DKP
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG					20.172.323.106		11.514.133.448	#DIV/0!	57,08	
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					19.546.323.106	800,00	11.391.419.448	N/A	58,28	
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan permasalahan pertanahan	%	100,00	100,00	22.500.000	N/A	22.174.000	N/A	98,55	DPTR
02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Bidang Tanah / Tahun	9,00	9,00	12.890.000.000	N/A	5.353.865.625	N/A	41,54	DPTR
02.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	%	3,00	3,00	22.500.000	N/A	14.835.000	N/A	65,93	DPTR
02.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%	0,00	1,00	22.500.000	N/A	18.752.000	N/A	83,34	DPTR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Percepatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	Bidang Tanah / Tahun	100386,00	100386,00	1.477.500.000	N/A	1.264.047.760	N/A	85,55	DPTR
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	43.472.000	100,00	32.689.600	100,00	75,20	DPTR
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	4.073.862.406	100,00	3.786.385.821	100,00	92,94	DPTR
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	390.180.000	100,00	323.875.196	100,00	83,01	DPTR
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	108.776.300	100,00	148.519.730	100,00	136,54	DPTR
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	463.532.400	100,00	402.664.716	100,00	86,87	DPTR
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan	%	100,00	100,00	-	100,00	5.500.000	100,00	#DIV/0!	DPTR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perundang-undangan									
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	18.000.000	100,00	7.135.000	100,00	39,64	DPTR
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	13.500.000	100,00	10.975.000	100,00	81,30	DPTR
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					626.000.000	0,00	122.714.000	N/A	19,60	DPTR
01.03.1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	%	80,00	85,80	626.000.000	N/A	122.714.000	N/A	19,60	DPTR
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					44.626.044.665		33.226.486.058	#DIV/0!	74,46	
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					44.626.044.665		33.226.486.058	N/A	74,46	
02.11.0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun per tahun	%	100,00	100,00	370.000.000	N/A	369.669.153	N/A	99,91	DLH
02.11.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran	%	68,00	65,00	563.700.000	N/A	739.984.200	N/A	131,27	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		lingkungan yang sesuai baku mutu									
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	%	10,00	10,00	163.000.000	N/A	162.252.000	N/A	99,54	DLH
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	%	1,73	1,73	22.000.000	N/A	21.891.500	N/A	99,51	DLH
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	4,33	4,33	65.000.000	N/A	64.662.000	N/A	99,48	DLH
02.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	%	67,00	100,00	30.000.000	N/A	29.938.000	N/A	99,79	DLH
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	%	5,00	5,00	40.000.000	N/A	61.794.500	N/A	154,49	DLH
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	%	1,20	1,20	20.000.000	N/A	36.170.000	N/A	180,85	DLH
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan	%	90,00	90,00	32.500.000	N/A	32.423.000	N/A	99,76	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
02.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	50,40	62,40	21.543.105.543	N/A	10.762.830.030	N/A	49,96	DLH
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	47.000.000		41.097.000	0,00	87,44	DLH
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	9.336.336.442		8.998.970.468	0,00	96,39	DLH
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	811.411.500		27.076.000	0,00	3,34	DLH
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	621.064.180		834.089.200	0,00	134,30	DLH
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	10.867.250.000		9.847.414.757	0,00	90,62	DLH
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan	%	100,00	100,00	-		-	0,00	#DIV/0!	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perundang-undangan									
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	23.000.000		15.060.000	0,00	65,48	DLH
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	30.677.000		1.158.544.250	0,00	3776,59	DLH
						40.000.000		22.620.000	#DIV/0!	56,55	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					-	N/A	-	N/A	0,00	DLH
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sistem Pengelolaan Persampahan	%	9,68	12,90	-	N/A	-	N/A	0,00	DLH
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAAN SIPIL					22.617.841.825		20.355.112.286	92,83	90,00	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					22.617.841.825		20.355.112.286	92,83	90,00	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	76,00	91,00	87.658.000	88,01	67.232.150	96,71	76,70	Disdukcapil
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95,00	99,00	318.443.000	96,35	241.452.650	97,32	75,82	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi/Badan Hukum Indonesia yang bekerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	25,00	65,00	819.332.000	5,71	769.472.859	8,78	93,91	Disdukcapil
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi yang memanfaatkan Data Profil Kependudukan	%	75,00	90,00	18.407.000	100,00	18.167.000	111,11	98,70	Disdukcapil
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	51.724.000	100,00	49.245.000	100,00	95,21	Disdukcapil
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	9.419.281.745	100,00	8.824.690.382	100,00	93,69	Disdukcapil
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	23.979.000	100,00	23.551.400	100,00	98,22	Disdukcapil
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	4.071.909.980	100,00	3.076.960.749	100,00	75,57	Disdukcapil
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	3.868.860.200	100,00	3.669.872.956	100,00	94,86	Disdukcapil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	2.955.000.000	100,00	2.730.205.000	100,00	92,39	Disdukcapil
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	177.406.900	100,00	160.687.800	100,00	90,58	Disdukcapil
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	805.840.000	100,00	723.574.340	100,00	89,79	Disdukcapil
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					30.436.423.014		22.629.139.357	100,93	74,35	
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					30.436.423.014	639,38	22.629.139.357	100,93	74,35	
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase status desa mandiri	%	5,00	20,73	277.547.500	41,21	268.685.500	198,79	96,81	DPMD
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	%	9,19	13,12	105.222.000	17,06	76.702.000	130,03	72,90	DPMD
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola dengan Baik	%	12,34	28,08	719.535.500	79,27	315.870.000	282,30	43,90	DPMD
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan	%	1,05	1,84	20.367.209.584	1,84	13.808.076.000	100,00	67,80	DPMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Desa yang berprestasi									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	69.466.700	100,00	53.699.497	100,00	77,30	DPMD
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	5.954.698.595	100,00	5.511.675.953	100,00	92,56	DPMD
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	622.001.810	100,00	588.938.660	100,00	94,68	DPMD
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	918.776.525	100,00	547.102.650	100,00	59,55	DPMD
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.401.964.800	100,00	1.458.389.097	100,00	104,02	DPMD
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan	%	100,00	100,00	-	0,00	-	0,00	0,00	DPMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perundang-undangan									
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	DPMD
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	DPMD
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					57.605.702.483		56.311.468.506	N/A	97,75	
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					57.605.702.483	800,00	56.311.468.506	N/A	97,75	
02.14.0 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya berusia dibawah 20 Tahun	%	NA	2,43	405.600.000	N/A	429.000.000	N/A	105,77	DPPKB
02.14.0 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan pemakaian kontrasepsi	%	69,62	68,36	18.513.353.000	N/A	18.701.496.699	N/A	101,02	DPPKB
02.14.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera yang ber-KB Di Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	82,50	82,76	13.729.200.000	N/A	13.727.360.000	N/A	99,99	DPPKB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	107.720.800	100,00	71.650.400	100,00	66,51	DPPKB
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	14.733.356.736	100,00	14.105.524.670	100,00	95,74	DPPKB
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	472.420.000	100,00	633.608.280	100,00	134,12	DPPKB
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	895.790.000	100,00	325.722.500	100,00	36,36	DPPKB
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	8.547.358.747	100,00	8.113.402.757	100,00	94,92	DPPKB
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	#DIV/0!	DPPKB
		Persentase ASN yang memiliki	%	100,00	100,00	125.903.200	100,00	118.703.200	100,00	94,28	DPPKB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		kesesuaian kompetensi									
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	75.000.000	100,00	85.000.000	100,00	113,33	DPPKB
	DINAS PERHUBUNGAN					65.469.849.324		68.962.015.740	90,00	105,33	
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					65.469.849.324	700,98	68.962.015.740	90,00	105,33	
02.15.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio	0,26	0,23	25.013.760.086	0,23	31.052.104.789	100,00	124,14	Dishub
02.15.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rasio	0,30	0,75	1.111.996.000	0,75	912.794.000	100,00	82,09	Dishub
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	33.182.400	100,00	30.546.400	100,00	92,06	Dishub
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	14.242.456.628	100,00	13.791.112.343	100,00	96,83	Dishub

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	1.537.043.410	100,00	1.549.543.051	100,00	100,81	Dishub
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	636.547.200	100,00	645.617.000	100,00	101,42	Dishub
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	22.094.121.200	100,00	20.055.810.662	100,00	90,77	Dishub
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	508.875.000	100,00	605.268.295	100,00	118,94	Dishub
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	291.867.400	100,00	319.219.200	100,00	109,37	Dishub
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	Dishub
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					18.398.893.931		17.545.111.091	#DIV/0!	95,36	
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					17.882.499.031	800,00	16.991.055.438	N/A	95,01	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
02.16.0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	%	10,00	60,00	4.378.273.800	N/A	4.384.779.613	N/A	100,15	DKIP
02.16.0 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	14,00	65,00	2.295.930.200	N/A	2.097.449.350	N/A	91,36	DKIP
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	54.000.000	100,00	54.000.000	100,00	100,00	DKIP
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	6.261.043.437	100,00	5.957.289.728	100,00	95,15	DKIP
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	873.570.000	100,00	791.336.991	100,00	90,59	DKIP
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	498.494.594	100,00	583.904.739	100,00	117,13	DKIP
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	3.392.423.200	100,00	2.926.762.017	100,00	86,27	DKIP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	37.123.300	100,00	87.889.000	100,00	236,75	DKIP
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	35.210.500	100,00	44.112.000	100,00	125,28	DKIP
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	56.430.000	100,00	63.532.000	100,00	112,59	DKIP
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					210.430.800		254.830.800	N/A	121,10	DKIP
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	16,00	66,00	210.430.800	N/A	254.830.800	N/A	121,10	DKIP
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					305.964.100		299.224.853	N/A	97,80	DKIP
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	13,00	65,00	305.964.100	N/A	299.224.853	N/A	97,80	DKIP
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					10.756.289.423		9.693.160.886	187,70	90,12	
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					10.756.289.423		9.693.160.886	187,70	90,12	
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan	%	NA	100,00	43.758.000	100,00	43.723.000	100,00	99,92	DKUKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Permohonan Izin KSP									
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntable	%	1,00	3,00	58.992.000	3,00	48.937.000	100,00	82,96	DKUKM
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	NA	5,00	42.250.000	5,00	42.182.500	100,00	99,84	DKUKM
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1,00	1,00	1.095.000.000	14,72	926.827.000	1472,00	84,64	DKUKM
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	NA	3,00	105.000.000	5,70	104.965.000	190,00	99,97	DKUKM
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	%	0,50	7,50	1.324.240.000	7,58	1.218.356.650	101,07	92,00	DKUKM
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,20	2,60	730.000.000	2,94	712.895.258	113,08	97,66	DKUKM
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	94.415.200	100,00	50.672.000	100,00	53,67	DKUKM
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	4.686.682.223	100,00	4.312.767.175	100,00	92,02	DKUKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	512.508.000	49,88	424.790.498	49,88	82,88	DKUKM
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	601.185.500	87,00	500.995.500	87,00	83,33	DKUKM
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.303.177.500	100,00	1.241.870.905	100,00	95,30	DKUKM
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	69.696.000	2,52	11.650.000	2,52	16,72	DKUKM
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	57.318.000	100,00	25.472.600	100,00	44,44	DKUKM
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	32.067.000	100,00	27.055.800	100,00	84,37	DKUKM
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU					10.264.220.700		8.439.467.851	100,00	82,22	
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					10.264.220.700	998,37	8.439.467.851	101,04	82,22	
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Peta Potensi Investasi	Kecamatan	8,00	8,00	88.000.000	8,00	5.000.000	100,00	5,68	DPMPSTP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Daerah Berbasis Digital									
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	5,00	9,74	168.410.000	5,01	155.746.490	51,44	92,48	DPMPTSP
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	%	90,00	100,00	321.009.800	100,00	175.962.000	100,00	54,82	DPMPTSP
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Penanaman Modal	%	6,00	16,23	777.679.000	24,61	581.210.000	151,63	74,74	DPMPTSP
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Investasi yang memenuhi Standar Persyaratan OSS	%	25,00	55,00	15.500.000	60,75	15.494.000	110,45	99,96	DPMPTSP
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	75.000.000	100,00	73.102.000	100,00	97,47	DPMPTSP
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	4.451.879.923	100,00	4.075.140.627	100,00	91,54	DPMPTSP
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	21.000.000	100,00	9.577.500	100,00	45,61	DPMPTSP
		Persentase Pemenuhan	%	100,00	100,00	601.515.277	100,00	477.729.327	100,00	79,42	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran									
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.084.939.600	100,00	994.556.583	100,00	91,67	DPMPTSP
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	635.053.600	100,00	136.685.000	100,00	21,52	DPMPTSP
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	42.000.000	100,00	41.100.000	100,00	97,86	DPMPTSP
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	1.982.233.500	100,00	1.698.164.324	100,00	85,67	DPMPTSP
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					40.915.308.144		37.089.494.663		90,65	
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					29.529.370.000	273,43	26.578.319.937	239,71	90,01	
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan Penysadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	%	6,00	16,00	2.062.750.000	84,90	1.751.179.000	530,60	84,90	Disbudpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	%	50,00	100,00	26.161.620.000	89,98	23.540.987.937	89,98	89,98	Disbudpora
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan	%	0,00	100,00	1.305.000.000	98,56	1.286.153.000	98,56	98,56	Disbudpora
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					11.385.938.144	1119,70	10.511.174.726	206,78	92,32	Disbudpora
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	45,00	100,00	1.430.000.000	68,16	974.733.700	68,16	68,16	Disbudpora
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Kesenian Tradisional daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	5,00	20,00	40.000.000	99,96	39.985.000	499,81	99,96	Disbudpora
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Peningkatan Sejarah Lokal yang dibina	%	2,00	20,00	15.000.000	94,03	14.105.000	470,17	94,03	Disbudpora
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peningkatan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	%	10,00	20,00	97.162.000	99,11	96.297.000	495,55	99,11	Disbudpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Layanan Museum terhadap masyarakat	%	10,00	20,00	1.550.000.000	99,00	1.534.565.612	495,02	99,00	Disbudpora	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	76.200.000	81,68	62.240.000	81,68	81,68	Disbudpora	
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	4.441.117.844	91,82	4.077.950.214	91,82	91,82	Disbudpora	
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	511.120.000	80,12	409.503.300	80,12	80,12	Disbudpora	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	451.622.300	104,37	471.374.000	104,37	104,37	Disbudpora	
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	2.642.216.000	102,18	2.699.770.900	102,18	102,18	Disbudpora	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan	%	100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	Disbudpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perundang-undangan									
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	113.500.000	99,25	112.650.000	99,25	99,25	Disbudpora
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	100,00	Disbudpora
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					13.918.998.888	800,00	14.009.203.702	N/A	100,65	
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.143.733.100	0,00	3.253.265.926	N/A	103,48	Diarpus
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	NA	60,00	2.861.221.100	N/A	2.973.209.592	N/A	103,91	Diarpus
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara dan naskah kuno yang diinventarisasi dan dilestarikan	Eksemplar	30,00	630,00	282.512.000	N/A	280.056.334	N/A	99,13	Diarpus
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					10.775.265.788	800,00	10.755.937.776	N/A	99,82	Diarpus
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	25,00	70,00	349.861.000	N/A	421.126.800	N/A	120,37	Diarpus

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	%	25,00	70,00	211.147.300	N/A	161.641.300	N/A	76,55	Diarpus
02.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peningkatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	25,00	70,00		N/A		N/A	#DIV/0!	Diarpus
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	136.812.150	100,00	77.729.023	100,00	56,81	Diarpus
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	6.348.795.288	100,00	6.591.560.809	100,00	103,82	Diarpus
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	1.517.880.000	100,00	1.430.617.450	100,00	94,25	Diarpus

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	670.188.200	100,00	532.373.492	100,00	79,44	Diarpus
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.243.160.000	100,00	1.143.081.302	100,00	91,95	Diarpus
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	66.698.000	100,00	49.650.000	100,00	74,44	Diarpus
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	209.628.250	100,00	324.290.000	100,00	154,70	Diarpus
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	21.095.600	100,00	23.867.600	100,00	113,14	Diarpus
	DINAS PERIKANAN					19.847.073.563		18.121.925.236	N/A	91,31	
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					19.847.073.563		18.121.925.236	N/A	91,31	Diskan
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	2,00	2,00	5.380.444.210	N/A	4.591.734.891	N/A	85,34	Diskan
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi	%	2,00	2,00	2.093.091.295	N/A	1.793.017.800	N/A	85,66	Diskan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perikanan Budidaya									
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	%	0,00	2,00	17.798.000	N/A	27.798.000	N/A	156,19	Diskan
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	%	2,00	2,00	1.174.238.125	N/A	1.793.881.000	N/A	152,77	Diskan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	131.213.000	100,00	108.994.999	100,00	83,07	Diskan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	5.720.094.433	100,00	5.517.964.218	100,00	96,47	Diskan
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	1.435.272.600	100,00	964.785.170	100,00	67,22	Diskan
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	420.346.900	100,00	284.338.401	100,00	67,64	Diskan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	2.745.640.000	100,00	2.461.143.032	100,00	89,64	Diskan
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	681.475.000	100,00	532.585.025	100,00	78,15	Diskan
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	-		-	0,00	0,00	Diskan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	47.460.000	100,00	45.682.700	100,00	96,26	Diskan
	DINAS PARIWISATA					23.874.185.015		16.919.271.274	190,28	70,87	
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					23.874.185.015		16.919.271.274	190,28	70,87	Dispar
03.26.0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dibangun	%	4,00	4,00	5.363.088.500	-33,33	1.625.546.849	- 833,25	30,31	Dispar
03.26.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi Daya Tarik Wisata	%	5,00	5,00	4.814.000.000	94,44	3.187.604.125	1888,8 0	66,22	Dispar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan prasarana dan ekosistem ekonomi kreatif	%	20,00	20,00	218.865.000	20,00	218.865.000	100,00	100,00	Dispar
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	10,00	10,00	2.723.135.000	42,78	2.361.449.000	427,80	86,72	Dispar
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	38.000.000	100,00	37.404.000	100,00	98,43	Dispar
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	6.575.886.593	100,00	5.577.170.382	100,00	84,81	Dispar
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	697.570.000	100,00	673.765.500	100,00	96,59	Dispar
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	603.207.122	100,00	494.715.500	100,00	82,01	Dispar
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan	%	100,00	100,00	2.630.347.800	100,00	2.499.665.918	100,00	95,03	Dispar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		kebutuhan perkantoran									
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-	0,00	-	0,00	0,00	Dispar
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	186.135.000	100,00	154.135.000	100,00	82,81	Dispar
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	23.950.000	100,00	88.950.000	100,00	371,40	Dispar
	DINAS PERTANIAN					153.430.785.163		142.457.924.092	N/A	92,85	
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					153.430.785.163		142.457.924.092	N/A	92,85	Distan
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100,00	100,00	13.651.991.200	N/A	12.624.980.578	N/A	92,48	Distan
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100,00	100,00	105.119.751.425	N/A	95.897.832.567	N/A	91,23	Distan
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi	%	0,00	100,00	161.010.500	N/A	165.807.200	N/A	102,98	Distan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian	%	0,00	100,00	412.675.000	N/A	410.633.000	N/A	99,51	Distan
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya	%	100,00	100,00	3.315.779.500	N/A	3.062.125.050	N/A	92,35	Distan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	164.024.000	100,00	189.767.000	100,00	115,69	Distan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	22.862.344.638	100,00	22.091.052.571	100,00	96,63	Distan
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	661.640.000	100,00	620.560.182	100,00	93,79	Distan
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	1.411.973.500	100,00	1.351.149.691	100,00	95,69	Distan
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	2.938.020.800	100,00	2.750.431.413	100,00	93,62	Distan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	2.406.820.200	100,00	2.989.664.678	100,00	124,22	Distan
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	297.254.400	100,00	277.114.662	100,00	93,22	Distan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	27.500.000	100,00	26.805.500	100,00	97,47	Distan
	DINAS PETERNAKAN					18.261.539.031		15.659.116.801	N/A	85,75	
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					18.261.539.031		15.659.116.801	N/A	85,75	Disnak
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100,00	100,00	3.765.317.700	N/A	2.703.270.200	N/A	71,79	Disnak
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100,00	100,00	1.893.602.600	N/A	1.495.629.100	N/A	78,98	Disnak
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	%	5,00	5,00	2.166.025.000	N/A	1.868.742.850	N/A	86,28	Disnak
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	55.000.000	N/A	-	N/A	0,00	Disnak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		peternakan yang difasilitasi									
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha peternakan	%	0,00	100,00	24.585.000	N/A	26.575.000	N/A	108,09	Disnak
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan peternak yang meningkatkan kapasitasnya	%	100,00	100,00	100.000.000	N/A	102.035.500	N/A	102,04	Disnak
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	87.327.000	100,00	32.609.473	100,00	37,34	Disnak
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	8.489.300.461	100,00	8.153.920.565	100,00	96,05	Disnak
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	622.000.000	100,00	537.570.546	100,00	86,43	Disnak
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	270.115.070	100,00	107.298.900	100,00	39,72	Disnak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	787.032.000	100,00	630.474.667	100,00	80,11	Disnak
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-		-	0,00	0,00	Disnak
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	-		-	0,00	0,00	Disnak
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	1.234.200	100,00	990.000	100,00	80,21	Disnak
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					27.742.264.072	1296,99	28.078.884.182	186,99	101,21	
03.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					125.000.000	100,00	115.991.460	100,00	92,79	Disdagin
03.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase layanan fasilitasi izin pemanfaatan panas bumi daerah	%	100,00	100,00	125.000.000	100,00	115.991.460	100,00	92,79	Disdagin
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					24.544.386.150	1196,99	24.495.635.577	273,98	99,80	Disdagin
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran	%	0,00	100,00	90.016.200	100,00	89.990.200,00	100,00	99,97	Disdagin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		perusahaan yang Difasilitasi									
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100,00	100,00	2.239.451.750	N/A	3.220.015.404,00	N/A	143,79	Disdagin
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah	%	100,00	100,00	292.250.000	N/A	269.923.900,00	N/A	92,36	Disdagin
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Produk daerah Siap Ekspor	%	0,00	12,00	200.000.000	238,99	181.450.000,00	1991,58	90,73	Disdagin
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0,00	39,00	574.433.000	N/A	381.359.000,00	N/A	66,39	Disdagin
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk unggulan Lokal yang masuk pusat sarana distribusi perdagangan	Produk	0,00	18,00	450.610.000	58,00	446.186.000,00	322,22	99,02	Disdagin
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	210.703.400	100,00	173.339.400	100,00	82,27	Disdagin
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang	%	100,00	100,00	13.729.799.000	100,00	13.088.460.559	100,00	95,33	Disdagin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan									
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	3.279.510.000	100,00	2.651.750.956	100,00	80,86	Disdagin
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	978.628.000	100,00	1.646.348.400	100,00	168,23	Disdagin
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	2.041.704.800	100,00	2.013.245.758	100,00	98,61	Disdagin
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	0,00	#DIV/0!	Disdagin
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	457.280.000	100,00	333.566.000	100,00	72,95	Disdagin
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	0,00	#DIV/0!	Disdagin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.072.877.922		3.467.257.145	N/A	112,83	Disdagin
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah IKM Mandiri	%	9,10	9,81	2.774.349.000	N/A	3.200.708.345,00	N/A	115,37	Disdagin
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Jumlah perusahaan yang memiliki izin usaha	%	1,34	1,96	100.000.000	N/A	98.020.000,00	N/A	98,02	Disdagin
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase IKM yang melaporkan data industry melalui akun SIINAS	%	100,00	100,00	198.528.922	N/A	168.528.800,00	N/A	84,89	Disdagin
04.01	SEKRETARIAT DAERAH					107.941.809.110		99.003.071.432	102,24	91,72	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					107.941.809.110		99.003.071.432	102,24	91,72	SETDA
04.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skoring LPPD Kabupaten	poin	3,62	3,70	1.484.000.000	3,50	1.256.892.334	94,59	84,70	SETDA
		Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	%	100,00	100,00	1.274.600.000	94,44	1.119.697.558	94,44	87,85	SETDA
		Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	%	75,00	75,00	597.950.000	90,48	651.319.371	120,64	108,93	SETDA
		Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%	100,00	100,00	35.712.000.000	100,00	32.763.456.000	100,00	91,74	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian yang terlaksana	%	100,00	100,00	2.484.100.000	90,91	2.326.439.472	90,91	93,65	SETDA
		Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi	%	95,00	97,00	715.562.700	95,29	591.977.415	98,24	82,73	SETDA
		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Predikat	proaktif	strategis	1.191.478.000	Strategis	1.015.942.359	100,00	85,27	SETDA
		Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi sumber daya alam berwawasan lingkungan	%	9,00	27,00	766.510.400	27,00	694.003.000	100,00	90,54	SETDA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	386.500.000	100,00	296.188.200	100,00	76,63	SETDA
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	%	100,00	100,00	31.444.969.948	100,00	29.056.279.926	100,00	92,40	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perundang-undangan									
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	7.369.304.000	100,00	6.610.418.034	100,00	89,70	SETDA
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	10.316.999.900	100,00	9.884.856.765	100,00	95,81	SETDA
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	5.928.030.000	100,00	5.668.491.281	100,00	95,62	SETDA
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	2.263.896.600	100,00	1.784.485.000	100,00	78,82	SETDA
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	659.865.000	100,00	551.080.400	100,00	83,51	SETDA
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	1.288.093.000	100,00	1.242.699.000	100,00	96,48	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	11,00	13,00	974.031.000	11,46	817.007.600	88,15	83,88	SETDA
		Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana	%	100,00	100,00	791.280.000	157,00	690.000.000	157,00	87,20	SETDA
		Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu	%	100,00	100,00	1.632.638.562	100,00	1.344.337.717	100,00	82,34	SETDA
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah	%	88,00	89,50	660.000.000	90,30	637.500.000	100,89	96,59	SETDA
04.02	SEKRETARIAT DPRD					72.478.374.826		74.370.630.358	N/A	102,61	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					72.478.374.826		74.370.630.358	N/A	102,61	Setwan
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Persidangan dan Perundang-undangan	%	95,00	95,00	4.211.167.700	N/A	3.826.044.700	N/A	90,85	Setwan
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Umum	%	95,00	95,00	6.100.945.400	N/A	9.150.224.220	N/A	149,98	Setwan
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Fasilitas	%	95,00	95,00	15.355.246.000	N/A	14.529.204.689	N/A	94,62	Setwan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Pengawasan dan Penganggaran									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	480.230.100	100,00	494.047.400	100,00	102,88	Setwan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	5.029.862.959	100,00	5.029.860.664	100,00	100,00	Setwan
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	1.747.413.814	100,00	1.457.257.052	100,00	83,40	Setwan
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	1.767.696.416	100,00	1.741.795.550	100,00	98,53	Setwan
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	3.856.550.400	100,00	3.509.488.556	100,00	91,00	Setwan
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan	%	100,00	100,00	531.541.900	100,00	331.185.000	100,00	62,31	Setwan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perundang-undangan									
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	1.185.708.800	100,00	1.795.938.882	100,00	151,47	Setwan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	40.815.900	100,00	41.773.500	100,00	102,35	Setwan
		terlaksannya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				31.931.195.437	N/A	32.253.810.145	N/A	101,01	Setwan
		Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD				240.000.000	N/A	210.000.000	N/A	87,50	Setwan
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					20.243.251.549		16.830.666.058	128,38	83,14	
05.01	PERENCANAAN					18.958.749.549		16.088.090.819	96,75	84,86	Bappelitbangda
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	%	100,00	100,00	2.045.284.400	100,00	1.796.780.223	100,00	87,85	Bappelitbangda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	25,04	25,76	750.119.251	23,02	749.520.576	89,36	99,92	Bappelitbangda
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	25,85	26,57	710.833.754	23,93	702.566.005	90,06	98,84	Bappelitbangda
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	26,12	26,84	667.419.631	21,90	578.052.532	81,59	86,61	Bappelitbangda
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	505.181.396	100,00	146.907.100	100,00	29,08	Bappelitbangda
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	8.835.744.146	100,00	8.080.768.350	100,00	91,46	Bappelitbangda
		Persentase sarana dan prasarana	%	100,00	100,00	2.098.197.662	100,00	1.414.602.615	100,00	67,42	Bappelitbangda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		kantor dalam kondisi baik									
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	1.190.021.059	100,00	1.155.695.656	100,00	97,12	Bappelitbangda
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.063.430.500	100,00	916.248.762	100,00	86,16	Bappelitbangda
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	543.662.000	100,00	276.189.000	100,00	50,80	Bappelitbangda
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	525.500.000	100,00	247.601.800	100,00	47,12	Bappelitbangda
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	23.355.750	100,00	23.158.200	100,00	99,15	Bappelitbangda
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.284.502.000		742.575.239	160	57,81	Bappelitbangda
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/diimplementasikan	%	NA	62,50	1.284.502.000	100	742.575.239	160	57,81	Bappelitbangda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					776.359.150.913		760.877.137.819	N/A	98,01	
05.02	KEUANGAN					776.359.150.913		760.877.137.819	N/A	98,01	BPKAD
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketercapaian mandatory APBD	%	100,00	100,00	1.385.186.500	N/A	701.187.599.538	N/A	50620,45	BPKAD
		Persentase realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah	%	92,00	93,50	707.203.139.466	N/A	963.953.131	N/A	0,14	BPKAD
		Persentase ketercapaian penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	%	100,00	100,00	1.620.026.000	N/A	1.278.850.425	N/A	78,94	BPKAD
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Aset daerah	%	100,00	100,00	2.651.244.100	N/A	2.096.855.799	N/A	79,09	BPKAD
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	160.878.200	100,00	149.406.500	100,00	92,87	BPKAD
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	56.803.235.147	100,00	50.507.446.455	100,00	88,92	BPKAD
		Persentase sarana dan prasarana	%	100,00	100,00	128.660.800	100,00	117.274.000	100,00	91,15	BPKAD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		kantor dalam kondisi baik									
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	2.549.239.500	100,00	1.616.949.568	100,00	63,43	BPKAD
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.868.883.000	100,00	1.641.264.786	100,00	87,82	BPKAD
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	291.888.000	100,00	182.000.000	100,00	62,35	BPKAD
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	735.390.200	100,00	421.146.704	100,00	57,27	BPKAD
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	961.380.000	100,00	714.390.913	100,00	74,31	BPKAD
	BADAN PENDAPATAN DAERAH					30.482.704.768		28.383.274.572	101,83	93,11	
05.02	KEUANGAN					30.482.704.768	805,51	28.383.274.572	101,83	93,11	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	28,24	4,73	4.911.449.600	5,51	4.146.801.322	116,49	84,43	BAPENDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	222.737.200	100,00	202.583.781	100,00	90,95	BAPENDA
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	19.773.516.308	100,00	19.456.346.132	100,00	98,40	BAPENDA
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	852.180.000	100,00	466.863.950	100,00	54,78	BAPENDA
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	1.579.288.460	100,00	1.324.445.552	100,00	83,86	BAPENDA
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	2.190.169.200	100,00	2.065.503.385	100,00	94,31	BAPENDA
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	638.340.000	100,00	429.049.000	100,00	67,21	BAPENDA
		Persentase ASN yang memiliki	%	100,00	100,00	267.870.600	100,00	244.638.250	100,00	91,33	BAPENDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		kesesuaian kompetensi									
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	47.153.400	100,00	47.043.200	100,00	99,77	BAPENDA
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA					27.356.298.994		24.654.696.543	96,22	90,12	
05.03	KEPEGAWAIAN					24.054.299.194	1005,83	21.316.069.933	101,75	88,62	
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai dimensi kualifikasi	Nilai	13,13	13,40	3.811.327.200	21,03	2.863.320.585	156,94	75,13	BKPSDM
		Persentase Pemenuhan Pegawai Akibat Pemberhentian	%	100,00	100,00	1.270.000.000	54,00	1.252.120.386	54,00	98,59	BKPSDM
		Persentase Ketersuaian Jabatan dengan Kualifikasi dan Kompetensi	%	100,00	100,00	1.432.350.400	100,00	1.108.489.000	100,00	77,39	BKPSDM
		Nilai Dimensi Disiplin dan Kinerja	Nilai	27,00	28,00	868.854.000	30,8	753.787.200	110,00	86,76	BKPSDM
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	78.937.400	100,00	92.522.000	100,00	117,21	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	12.525.973.654	100,00	11.907.932.945	100,00	95,07	BKPSDM
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	1.440.432.000	100,00	1.108.822.560	100,00	76,98	BKPSDM
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	1.001.258.240	100,00	880.668.300	100,00	87,96	BKPSDM
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	1.081.166.300	100,00	1.064.586.957	100,00	98,47	BKPSDM
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	350.000.000	100,00	125.000.000	100,00	35,71	BKPSDM
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	134.000.000	100,00	105.567.000	100,00	78,78	BKPSDM
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan	%	100,00	100,00	60.000.000	100,00	53.253.000	100,00	88,76	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Perundang-undangan									
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.301.999.800	27,21	3.338.626.610	90,70	101,11	
05.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	10,88	30,00	3.301.999.800	27,21	3.338.626.610	90,70	101,11	BKPSDM
06.01	INSPEKTORAT					21.255.285.629		21.399.990.839	100,00	100,68	
	UNSUR PENGAWASAN					21.255.285.629	806,30	21.399.990.839	100,00	100,68	
06.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,00	3,30	2.899.808.000	3,3	3.237.152.721	100,00	111,63	Inspektorat
06.01.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2,00	3,00	670.795.500	3,00	847.311.100	100,00	126,31	Inspektorat
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	68.354.000	100	74.397.000	100,00	108,84	Inspektorat
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	12.993.010.359	100	13.089.429.121	100,00	100,74	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	1.303.935.600	100	29.330.000	100,00	2,25	Inspektorat
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	849.825.300	100	720.296.400	100,00	84,76	Inspektorat
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	856.514.800	100,00	824.354.609	100,00	96,25	Inspektorat
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	742.222.070	100	737.162.000	100,00	99,32	Inspektorat
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	839.560.000	100	802.882.388	100,00	95,63	Inspektorat
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	31.260.000	100	1.037.675.500	100,00	3319,50	Inspektorat
07.01	KECAMATAN					149.964.601.233		141.989.809.815	N/A	94,68	
	UNSUR KEWILAYAHAN					149.964.601.233		141.989.809.815	N/A	94,68	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	%	89,40	92,13	509.431.000	N/A	478.765.000	N/A	93,98	Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100,00	100,00	5.494.971.800	N/A	5.383.800.650	N/A	97,98	Kecamatan
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	%	80,00	20,00	1.855.586.820	N/A	1.214.101.400	N/A	65,43	Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	%	100,00	100,00	686.001.000	N/A	663.400.300	N/A	96,71	Kecamatan
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	%	89,40	92,13	723.759.000	N/A	679.756.800	N/A	93,92	Kecamatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	393.900.340	100,00	380.831.000	100,00	96,68	Kecamatan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	109.751.890.235	100,00	104.018.028.398	100,00	94,78	Kecamatan
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	9.245.738.000	100,00	8.587.939.225	100,00	92,89	Kecamatan
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	6.553.842.861	100,00	6.642.573.875	100,00	101,35	Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	13.976.685.977	100,00	13.288.264.467	100,00	95,07	Kecamatan
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	574.438.900	100,00	465.950.000	100,00	81,11	Kecamatan
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	59.981.000	100,00	65.941.000	100,00	109,94	Kecamatan
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	123.504.300	100,00	110.587.700	100,00	89,54	Kecamatan
		Penataan Organisasi				14.870.000	100,00	9.870.000	N/A	66,38	Kecamatan
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					123.573.342.329		124.030.955.334	100,90	100,37	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					123.573.342.329		124.030.955.334	100,90	100,37	
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	indeks	80,00	82,50	1.397.181.400	85,70	1.044.066.000	103,88	74,73	Bakesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	75,50	77,00	112.822.234.250	72,00	113.088.958.196	93,51	100,24	Bakesbangpol
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Profesionalisme Ormas	Indeks	70,00	71,50	621.175.000	73,00	488.490.000	102,10	78,64	Bakesbangpol
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Indeks	69,00	70,50	500.000.000	71,31	514.087.000	101,15	102,82	Bakesbangpol
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	%	10,00	25,00	1.865.000.000	27,78	3.319.692.200	111,12	178,00	Bakesbangpol
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	259.483.920	100,00	89.641.500	100,00	34,55	Bakesbangpol
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	4.498.973.959	100,00	3.983.031.677	100,00	88,53	Bakesbangpol
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	493.040.000	100,00	402.994.900	100,00	81,74	Bakesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target RKPD Tahun 2024		Realisasi APBD Tahun 2024		Capaian Kinerja		PD Pengampu
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	204.485.000	100,00	215.185.000	100,00	105,23	Bakesbangpol
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	493.443.200	100,00	471.084.761	100,00	95,47	Bakesbangpol
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	85.675.000	100,00	87.661.000	100,00	102,32	Bakesbangpol
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	326.151.100	100,00	319.563.600	100,00	97,98	Bakesbangpol
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	6.499.500	100,00	6.499.500	100,00	100,00	Bakesbangpol
						4.912.471.493.406		4.469.999.413.208			

Tabel 3.8. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah Terhadap RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja	
		Kinerja	Rp
1	DINAS PENDIDIKAN	N/A	95,58
2	DINAS KESEHATAN	N/A	88,19
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	98,39	90,97
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	89,03	50,48
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	95,76	96,26
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	98,48	80,91
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	178,10	95,52
8	DINAS SOSIAL	83,26	64,68
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	85,81	88,10
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	86,31	95,17
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	100,00	96,14
12	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	N/A	57,08
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	N/A	74,46
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAAN SIPIL	92,83	90,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100,93	74,35
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	N/A	97,75
17	DINAS PERHUBUNGAN	90,00	105,33
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	N/A	95,36
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	187,70	90,12
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	100,00	82,22
21	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	N/A	90,65
22	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	N/A	100,65
23	DINAS PERIKANAN	N/A	91,31
24	DINAS PARIWISATA	190,28	70,87
25	DINAS PERTANIAN	N/A	92,85
26	DINAS PETERNAKAN	N/A	85,75
27	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	186,99	101,21
28	SEKRETARIAT DAERAH	102,24	91,72
29	SEKRETARIAT DPRD	N/A	102,61
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	128,38	83,14
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	N/A	98,01
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	101,83	93,11
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	96,22	90,12
34	INSPEKTORAT	100,00	100,68
35	KECAMATAN	N/A	94,68
36	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100,90	100,37

3.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, memiliki peran bagi pencapaian pembangunan Jawa Barat. Capaian beberapa indikator makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 di tingkat Jawa Barat dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dilihat dari posisi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi masih dikisaran 5,15 persen, dan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi menempati urutan 4 terendah. Selanjutnya, posisi angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kabupaten Sukabumi berada pada 9 terendah se-Jawa Barat. Capaian Indikator angka kemiskinan diikuti dengan capaian indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indeks gini. Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 sebagai kabupaten/kota dengan TPT tertinggi ke-10 setelah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan capaian indeks gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan untuk Kabupaten Sukabumi menempati urutan ke-13 terendah setelah Kabupaten Cianjur.

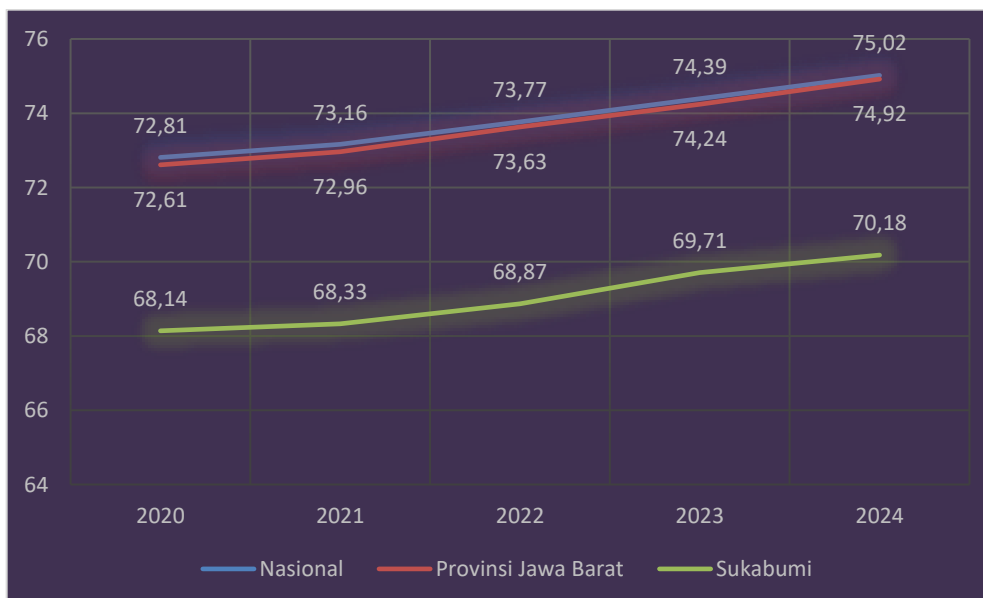
Tabel 5.15.
Capaian Indikator Makro Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Wilayah Jawa Barat	IPM	KEMISKINAN	TPT	LPE	GINI RASIO
1	Provinsi Jawa Barat	74,92	7,46	6,75	4,91	0,421
2	Bogor	73,63	7,05	7,34		0,369
3	Sukabumi	70,18	6,87	7,11	5,15	0,366
4	Cianjur	68,89	10,14	5,99		0,361
5	Bandung	74,59	6,19	6,36		0,348
6	Garut	69,91	9,68	6,96		0,355
7	Tasikmalaya	69,98	10,23	3,74		0,361
8	Ciamis	73,64	7,39	3,37		0,323
9	Kuningan	71,56	11,88	7,78		0,372
10	Cirebon	72,3	11	6,74		0,319
11	Majalengka	71,37	10,82	4,01		0,331
12	Sumedang	74,57	9,1	6,16		0,397
13	Indramayu	70,72	11,93	6,25		0,404
14	Subang	72,05	9,49	6,73		0,344
15	Purwakarta	73,99	8,41	7,34		0,464
16	Karawang	73,82	7,86	8,04		0,351
17	Bekasi	76,8	4,8	8,82		0,341
18	Bandung Barat	70,77	10,49	6,7		0,342
19	Pangandaran	71,03	8,75	1,58		0,414
20	Kota Bogor	79,03	6,53	8,13		0,459
21	Kota Sukabumi	77,69	7,2	8,34		0,428

No	Wilayah Jawa Barat	IPM	KEMISKINAN	TPT	LPE	GINI RASIO
22	Kota Bandung	83,75	3,87	7,4		0,374
23	Kota Cirebon	78,09	9,02	6,29		0,402
24	Kota Bekasi	83,55	4,01	7,82		0,389
25	Kota Depok	83,05	2,34	6,27		0,468
26	Kota Cimahi	80,3	4,39	8,97		0,394
27	Kota Tasikmalaya	76,03	11,1	6,49		0,458
28	Kota Banjar	75,01	5,85	5,44		0,337
29	Nasional	75,02	9,03	4,91	4,95	0,379

3.4.1. Indeks Pembangunan Manusia

Jika dilihat pada Gambar 3.3. apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, IPM Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah IPM Jawa Barat yaitu sebesar 70,18 poin. IPM Jawa Barat sebesar 74,92 poin pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 74,92 poin pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Nasional, IPM Kabupaten Sukabumi juga masih berada di bawah IPM Nasional. IPM Nasional sebesar 74,39 poin pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 75,02 poin pada tahun 2024.

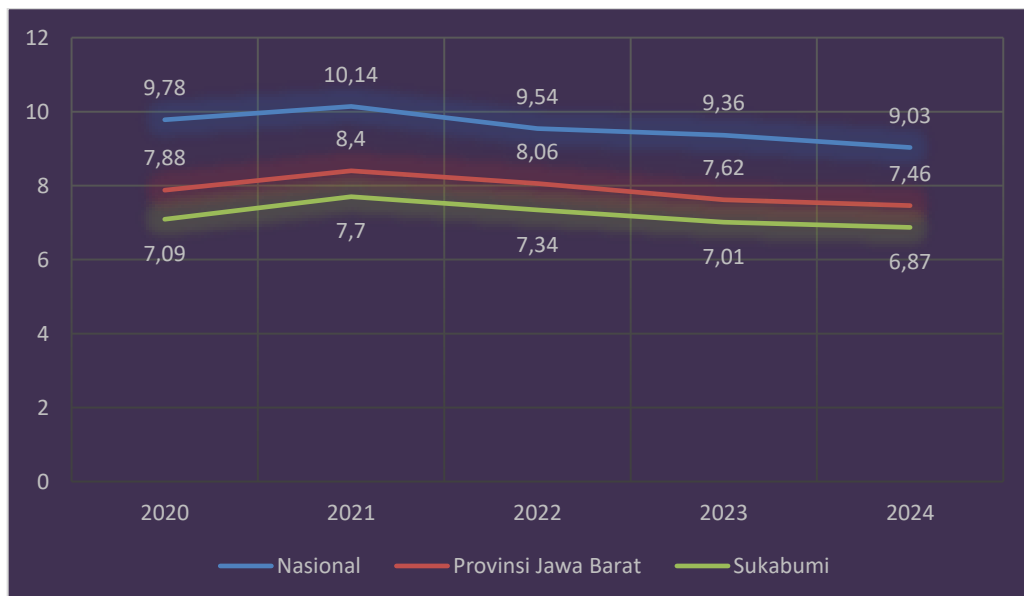


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 3.3. Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Target Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (poin)

3.4.2. Tingkat Kemiskinan

Jika dilihat pada Gambar 3.4. apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah Jawa Barat yaitu sebesar 6,87 persen. Tingkat Kemiskinan Jawa Barat sebesar 7,62 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 7,46 persen pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Nasional, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi juga masih berada di bawah Tingkat Kemiskinan Nasional. Nasional sebesar 9,36 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 9,03 persen pada tahun 2024.

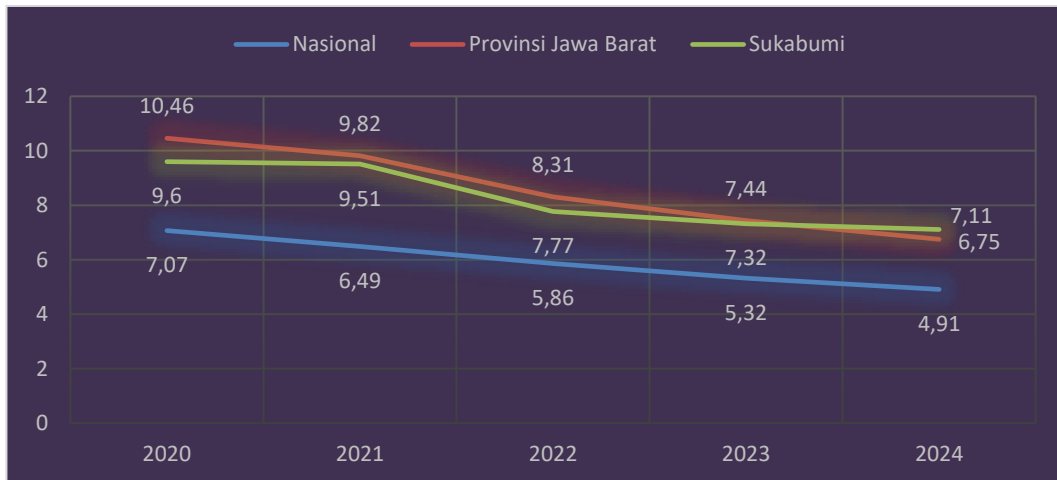


Gambar 3.4. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Dengan Jawa Barat, dan Target Sukabumi Tahun 2020-2024 (%)

3.4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jika dilihat pada Gambar 3.5. apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, TPT Kabupaten Sukabumi berada di atas Jawa Barat yaitu 7,11 persen. TPT Jawa Barat sebesar 7,44 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 6,75 persen pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Nasional, TPT Kabupaten Sukabumi juga masih berada di atas TPT Nasional. TPT Nasional

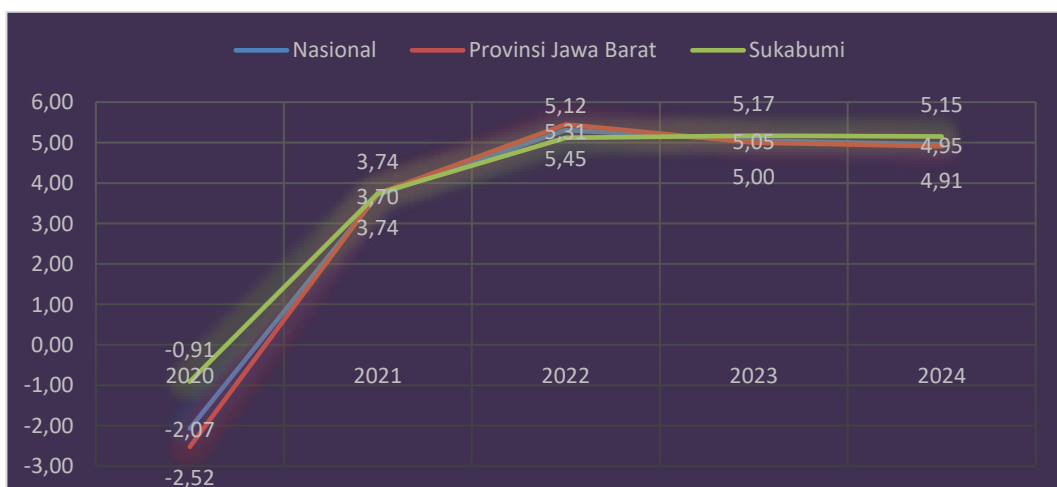
sebesar 5,32 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024.



Gambar 3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (%)

3.4.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

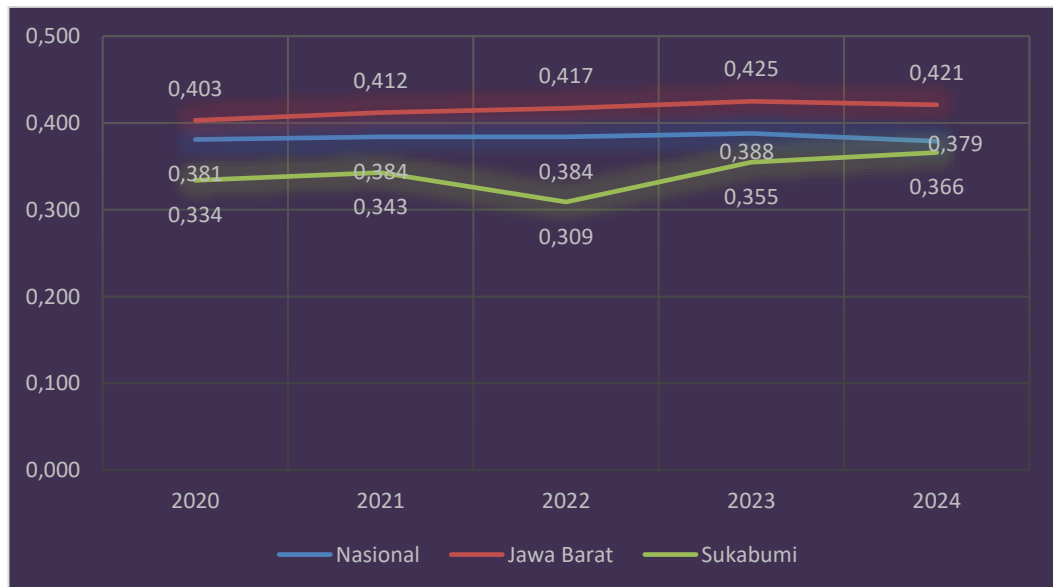
Jika dilihat pada Gambar 3.6. apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, LPE Kabupaten Sukabumi berada di atas Jawa Barat yaitu 5,15 persen. LPE Jawa Barat sebesar 5,00 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Nasional, TPT Kabupaten Sukabumi juga masih berada di atas LPE Nasional. LPE Nasional sebesar 5,05 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 4,95 persen pada tahun 2024.



Gambar 3.6. Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat tahun 2020-2024

3.4.5. Indeks Gini (gini rasio)

Jika dilihat pada Gambar 3.7. Indeks Gini Kabupaten Sukabumi berada di bawah Indeks Gini Nasional dan Jawa Barat. Indeks Gini Nasional berada pada angka 0,421 poin, sedangkan Jawa Barat di angka 0,379 poin dan Kabupaten Sukabumi di angka 0,366 poin.



Gambar 3.7. Trend Perbandingan Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat Tahun 2019– 2024 (poin)

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja di atas tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut. faktor-faktor pendukung pencapaian target-target kinerja tersebut, antara lain yaitu :

- a. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- b. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksana kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan;
- c. Adanya dukungan pendanaan dari APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dan sumber dana lainnya seperti *Coorporate Social Responsibility* (SCR);
- d. Tingginya komitmen perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kinerja;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi;
- f. Penerapan teknologi dan inovasi pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja;
- g. Meningkatnya partisipasi masyarakat/*stakeholder* dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di RKPD maupun APBD Tahun 2024.

Adapun beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain :

- a. Penyimpanan Anggaran kas/*Cash Budget* rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran
- b. Terjadinya keterlambatan pencairan karena penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan, dimana kondisi aplikasi tersebut belum bisa digunakan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah yang ada di seluruh Indonesia.
- c. Kegiatan yang bersumber dari DAK fisik belum dapat terserap, secara administrasi dan reuiu sudah dilakukan, menunggu salur tahap ke-2 dari RKUN ke RKUD
- d. Kegiatan yang bersumber dari Bankeu Kompetitif baru salur ke RKUD pada hari selasa tanggal 1 oktober 2024
- e. Kegiatan pengadaan tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang belum sampai tahap SPH Tanah

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri: Untuk DAK non Fisik sesuai aturan/Pedoman DAK harus dipindahkan ke Sub Kegiatan Penguatan, Kegiatan Kajian di dalam RKPD baru masuk bulan Agustus/RKPD Perubahan, oleh karenanya Kegiatan Kajian mulai akan dilaksanakan pada bulan oktober.
- g. Beberapa kegiatan tidak akan dilaksanakan pada Dinas Pariwisata seperti kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, karena terjadi banjir rob di lokasi kegiatan dan kegiatan *Event Surfing* kegiatannya berbarengan dengan pilkada, ada isu *megathrust*, ketidaksiapan panitia lokal serta kondisi cuaca yang tidak memungkinkan
- h. Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, yaitu aktivitas penyusunan FS Pengembangan Wisata di Kawasan Geopark Ciletuh sebesar Rp. 1.465.000.000 tidak akan diserap karena tidak ada di RKPD dan dialihkan pada Rancangan Perubahan RKA 2024 oleh TAPD
- i. Terjadinya bencana di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi mengakibatkan beberapa objek wisata yang biasa dikunjungi di hari libur sekolah maupun tahun baru tidak dapat dikunjungi.
- j. Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait;
- k. Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/provinsi.
- l. Rendahnya kapasitas fiskal APBD Kabupaten Sukabumi.

4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD berikutnya

Berdasarkan kesimpulan evaluasi hasil RKPD di atas, maka berikut disampaikan beberapa rekomendasi:

1. Optimalisasi pengendalian internal perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
2. Pengadaan barang/jasa agar dilakukan sejak awal untuk menghindari keterlambatan pekerjaan;
3. RKPD Tahun 2026 diprioritaskan untuk mendukung akselerasi ketercapaian target RPJMD 2025-2029
4. Penyesuaian indikator program, satuan dan target berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029
5. Memprioritaskan pada program dengan capaian kinerja sedang, rendah dan sangat rendah, serta
6. meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RKPD dan RPJMD.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian 26 IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi pada Triwulan IV Tahun 2024, 11 IKU melampaui target (42,31 persen), 1 IKU tercapai sesuai target (3,85 persen), 8 IKU tidak tercapai (30,77 persen) dan 6 IKU belum tersedia datanya sampai dengan laporan ini disusun (23,08 persen) Capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan capaian program sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, belum tersedia data realisasinya sampai laporan ini disusun, dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan dalam proses pelaksanaan.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi bahwa IKPD yang menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2024, dari 55 IKPD, terdapat 12 IKPD yang melampaui target (21,82 persen), 7 IKPD tercapai sesuai target (12,73 persen), 17 IKPD tidak tercapai (30,91 persen) dan 19 IKPD yang tidak tersedia data sampai dengan laporan ini disusun (34,55 persen).
3. Pada tahun 2024, Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan pemetaan Program dan kegiatan yang menunjang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, dimana pemetaan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) tujuan program, yaitu Meningkatkan Pendapatan, Menurunkan Beban Pengeluaran dan Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Pagu anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 sebesar Rp. 845.443.633.835,- (Delapan ratus empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah). Adapun sampai dengan triwulan IV tahun 2024 realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 826.465.824.405,- (Delapan ratus dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima Rupiah) atau terserap sebesar 97,76 persen.
4. Berdasarkan kategori nilai indeks pencapaian SPM, Kategori Tuntas Paripurna: Bidang Perumahan Rakyat (100 persen) dan Bidang Pekerjaan Umum (100 persen), Kategori Tuntas Utama: Bidang Pendidikan (99,29 persen), dan Bidang Trantibumlinmas (95,22 persen), dan Kategori Tuntas Madya: Bidang Kesehatan (88,82 persen) dan Bidang Sosial (89,69 persen).

5. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 9 perangkat daerah (25 persen) memiliki rata-rata tingkat capaian kinerja program >100 persen, 3 perangkat daerah (8,33 persen) memiliki rata-rata tingkat capaian kinerja program 100 persen, 10 Perangkat daerah (27,78 persen) memiliki rata-rata tingkat capaian kinerja program dibawah 100 persen, sedangkan 14 perangkat daerah belum menyampaikan data capaian kinerja programnya sampai dengan laporan ini disusun.
6. Ditinjau dari sisi capaian anggaran, perangkat daerah yang memiliki rata-rata tingkat capaian anggaran yang melebihi target anggaran RKPD (lebih dari 100 persen) yaitu: Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dinas Arsip Dan Perpustakaan, Inspektorat, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Sekretariat DPRD, dan Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk perangkat daerah yang memiliki rata-rata tingkat capaian anggaran rendah terdiri dari: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Dinas Lingkungan Hidup.
7. Capaian beberapa indikator makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 di tingkat Jawa Barat dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dilihat dari posisi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi masih dikisaran 5,15 persen, dan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi menempati urutan 4 terendah. Selanjutnya, posisi angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kabupaten Sukabumi berada pada 9 terendah se-Jawa Barat. Capaian Indikator angka kemiskinan diikuti dengan capaian indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indeks gini. Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 sebagai kabupaten/kota dengan TPT tertinggi ke-10 setelah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan capaian indeks gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan untuk Kabupaten Sukabumi menempati urutan ke-13 terendah setelah Kabupaten Cianjur.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan evaluasi hasil RKPD di atas, maka berikut disampaikan beberapa rekomendasi:

1. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk akselerasi penyampaian laporan evaluasi Renja yang tepat waktu dan laporan yang valid
2. Untuk lebih cermat dan teliti lagi, agar subkegiatan yang tidak ada dalam Renstra agar tidak diinput dalam RKPD/Renja, dan agar subkegiatan yang tidak diinput dalam RKPD untuk tidak dianggarkan dalam APBD.
3. Mencermati kembali indikator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317.Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah untuk diupdate dalam renja dan laporan renja perangkat daerah.

4. Konsistensi perencanaan dan penganggaran program RPJMD ke RKPD dan APBD tetap perlu dijaga pada tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dengan menggunakan SIPD.
5. Dalam rangka keterpaduan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Tahunan Daerah, maka evaluasi terhadap hasil RKPD ini supaya ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah oleh masing-masing perangkat daerah.
6. Mengidentifikasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada triwulan ini untuk selanjutnya dapat disusun strategi penyelesaian pada triwulan berikutnya.